

**ANALISIS KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENINGKATAN
PAD DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PADA TAHUN 2006-2015**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi (S.E)**

Oleh :

IKE JUNI ANTIKA

NPM: 1351010223



**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2017/1483 H**

**ANALISIS KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENINGKATAN
PAD DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM PADA TAHUN 2006-2015**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Ekonomi (S.E)**

Oleh :

IKE JUNI ANTIKA

NPM: 1351010223

**Pembimbing I : Ahmad Habibie. S.E.,M.E
Pembimbing II : Erike Anggraini D.B.A**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
2017/1483 H**

ABSTRAK

Pendapatan daerah di kota Bandar Lampung masih di dominasi oleh Dana Perimbangan yaitu dana transferan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu sebesar 57% dan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 21% pada tahun 2014. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah kota Bandar Lampung belum sepenuhnya di dapat secara mandiri. Salah satu sumber penerimaan daerah di kota Bandar Lampung yaitu Hasil Kekayaan Yang Di Pisahkan. Dimana selama lima tahun terakhir penerimaan dari Hasil Kekayaan Yang di Pisahkan ini bersifat fluktuatif. Sehingga Pendapatan yang berasal dari Hasil Kekayaan Yang Di Pisahkan seharusnya dapat meningkatkan pendapatan kota Bandar Lampung melalui laba BUMD, karena BUMD yang berjalan dengan lancar dan baik tentu akan memberikan dampak positif terhadap PAD sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengelolaannya.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah seberapa besar pengaruh kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD di Kota Bandar Lampung dan bagaimana pandangan ekonomi Islamnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan data sekunder dalam periode pengamatan 2006-2015. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dari BPPRD dan BPKAD, data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linear sederhana.

Secara keseluruhan hasil analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara parsial atau Uji-t kontribusi laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Kemudian, penelitian ini diperkuat dengan hasil kontribusi BUMD pada tahun 2006-2015 di Kota Bandar Lampung, dimana hasil kontribusi Laba BUMD terhadap PAD selama sepuluh tahun belakangan bersifat fluktuatif. Meskipun bersifat fluktuatif, tetapi laba BUMD tidak memberikan kontribusi dibawah 20%, sehingga dengan begitu kontribusi laba BUMD di Kota Bandar Lampung dikategorikan cukup baik selama sepuluh tahun. Dalam pandangan Ekonomi Islam, BUMD di kota Bandar Lampung tidak hanya sebagai alat pengumpul pendapatan daerah serta pengendalian ekonomi semata namun juga sebagai sumber pembiayaan di kota Bandar Lampung dengan menghasilkan produk pelayanan yang biasanya tersebar dalam barang dan jasa. Ini artinya pengoptimalan laba BUMD yang ada di kota Bandar Lampung sudah dapat dikatakan baik dan sesuai dengan pandangan Ekonomi Islam dimana pada akhirnya akan menyebabkan keadilan distribusi pendapatan yang tentu saja mensejahterakan masyarakat secara merata. Sehingga bagi pemerintah agar meningkatnya penerimaan daerah yang telah di targetkan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat kota Bandar Lampung dan bagi masyarakat agar tertib dalam memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.



**KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung (0721) 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : PENGARUH KONTRIBUSI (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006-2015)**

Nama Mahasiswa : Ike Juni Antika

NPM : 1351010223

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqasyahkan dan Dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Raden Intan Lampung

Bandar Lampung, 26 Oktober 2017

Pembimbing I

**Ahmad habibi S.E., M.E
NIP. 197905142003121003**

Pembimbing II

**Erike Anggraini D.B.A
NIP. 198208082011012009**

Ketua Jurusan

**Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 19750424 2002121001**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Sekretariat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Sukarame Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : PENGARUH KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2006-2015). Disusun oleh : Ike Juni Antika, NPM : 1351010223, Jurusan : Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung . Pada Hari/Tanggal : Kamis/16 November 2017.

DEWAN PENGUJI

Ketua : Hanif, S.E., M.M.

(.....)

Sekretaris : A Hazas Syarif, M.E.I.

(.....)

Penguji I : Any Eliza, M.S.Ak

(.....)

Penguji II : Ahmad Habibi, S.E.,M.E

(.....)

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dr. Moh. Bahrudin, M.A.
NIP.19580824 198903 1 003

MOTTO

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥٓ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

Artinya :“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”(Al-Jaatsiyah : 13)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT dan dari hati yang terdalam, penulisan skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak M.Arif s.p.d.i Dan Ibu Hamidah. Yang saya hormati dan saya banggakan. Selalu menguatkanu sepenuh jiwa raga, merawat, dan memotivasi saya dengan nasehat-nasehat yang luar biasa, serta mendoakan saya agar selalu ada dalam jalan-Nya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Ketiga Kakak saya, Insan Kamil B.A , Ibnu Muluk B.A dan Isabella ivo astria S.ST. yang sesantiasa selalu memberi semangat dan mendoakan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamaterku tercinta tempat saya menimba ilmu yaitu UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya, maju dan berkualitas.
4. Teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syari'ah angkatan 2013 yang tak henti-hentinya memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama nama lengkap Ike Juni Antika, dilahirkan di Kota Natar , Pada tanggal 11 Juni 1995. Penulis merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Bapak M.Arif s.p.d,i dan Ibu Hamidah. Adapun riwayat pendidikan penulis yaitu SD N 1 Natar pada Tahun 2007, lalu melanjutkan studi ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP N 1 Natar pada tahun 2007 lulus pada tahun 2010, setelah itu melanjutkan study ke jenjang sekolah menengah atas di SMA N 1 Natar yang diselesaikan pada tahun 2013.

Penulis diterima sebagai mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syari'ah, di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung melalui seleksi Ujian Masuk Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UMPTAIN) pada Tahun 2013.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan PAD Di Kota Bandar Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam Pada Tahun 2006-2015” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syari’ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh penyelesaian skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bantuan, kerjasama, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang selalu memotivasi mahasiswa untuk menjadi pribadi berkualitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islami.
2. Dr. Moh. Bahrudin, M.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
3. Madnasir, S.E., M.Si selaku ketua jurusan dan Deki Fermansyah, S.E., M.Si. selaku sekretaris jurusan Ekonomi Syari’ah senantiasa sabar dalam memberikan arahan serta motivasi kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Ahmad Habibi S.E,.M.E selaku pembimbing I yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Erike Anggraini D.B.A selaku pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk mengarahkan dan memberikan semangat kepada penulis hingga penulisan skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu serta motivasi yang bermanfaat kepada penulis hingga dapat menyelesaikan studi.
7. Pimpinan dan karyawan perpustakaan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut, serta perpustakaan daerah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Daerah Kota Bandar Lampung, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam mendapatkan data-data penelitian serta memberikan penjelasan mengenai data-data tersebut.
9. Sahabat seperjuangan khususnya kelas E, Jurusan Ekonomi Syari'ah, angkatan 2013 yang selalu bersama selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan, semangat, dan bantuan dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat dan Teman hidup saya yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis, yaitu, Ade wijaya, Dinda tauresia,

Rizky kusuma, Selma purnama, Anggun tri wahyuni dan lainnya terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.

Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang peneliti miliki. Untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Peneliti berharap hasil penelitian ini akan menjadi sumbangan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern.

Bandar Lampung, 24 oktober 2017
Penulis,

Ike juni antika
NPM. 1351010223

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep Pendapatan Asli Daerah	
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	16
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah.....	18
3. Pendapatan Asli Daerah Dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	23
B. Konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	
1. Pengertian BUMD.....	28
2. Sumber Modal BUMD	32
3. Ciri-ciri BUMD	37
4. Unsur-unsur pengelolaan BUMD	40
5. Tujuan Pendirian BUMD	41
6. Fungsi BUMD	42

7. Jenis-jenis BUMD	42
8. Kinerja BUMD.....	43
9. Optimalisasi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dalam Perspektif Ekonomi Islam	44
C. Penelitian Terdahulu	46
D. Kerangka Pemikiran.....	47
E. Hipotesis.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	52
B. Sifat Penelitian	53
C. Jenis dan Sumber Data	53
D. Teknik Pengumpulan Data.....	54
E. Populasi dan Sampel	54
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	
1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung	63
2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung	64
3. Gambaran Umum	66
B. Hasil Analisis Data	
1. Uji Analisis Kontribusi	75
2. Uji Normalitas.....	79
3. Alat Uji Hipotesis.....	80
4. Koefisien Determinasi.....	83
5. Pengaruh Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2006-2015.....	84
6. Kontribusi BUMD dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kota Bandar Lampung.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel .1.1	Target dan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015	7
Tabel .3.1	Daftar Operasional Variabel.....	56
Tabel 3.2	Klasifikasi Kreteria Kontribusi	59
Tabel .4.1	Daftar Walikota Bandar Lampung Beserta Periode Jabatan	65
Tabel 4.2	Pertumbuhan Laba Bank, pembiayaan, dan aset BPRS Kota Banda Lampung Tahun 2016-2017	70
Tabel .4.3	Kontribusi Laba BUMD Terhadap PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2006-2015	76
Tabel .4.4	Hasil Uji <i>Kolmogorov Smirnov</i>	80
Tabel .4.5	Hasil Uji Regresi Linier Sederhana.....	81
Tabel 4.6	Hasil Uji Koefisien Determinasi	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar.2.1	Kerangka Pemikiran	48
Gambar 4.1	Tarif Pelanggan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung	67
Gambar 4.2	Kondisi Pelayanan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung Tahun2012-2015.....	68

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung Nomor 01 tahun 2017
tentang penunjukan dosen pembimbing skripsi mahasiswa semester
genap tahun akademik 2016/2017

Lampiran 3 : Surat Riset oleh KESBANGPOL Kota Bandar Lampung

Lampiran 4 : Kartu Konsultasi Skripsi

Lampiran 5 : Data Olahan SPSS

Lampiran 6 : Tabel Uji T Tabel

Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Bandar Lampung Tahun 2007-2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum penulis menguraikan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dijelaskan istilah dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam skripsi ini. Dengan harapan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud. Adapun judul skripsi ini adalah Adapun skripsi ini berjudul **“PENGARUH KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006-2015 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. **Pengaruh** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.¹
2. **Kontribusi** menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai uang iuran pada perkumpulan, sumbangan.²
3. **BUMD** adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah.³

¹ Kementrian Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2015), h.147.

² Yadiano, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : M2S, 2001), h. 282.

4. **Pendapatan Asli Daerah** adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.⁴

5. **Ekonomi Islam** adalah suatu cabang Ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang islami.⁵

Secara keseluruhan penjelasan dari judul penelitian ini **“PENGARUH KONTRIBUSI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2006-2015 DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”** adalah menganalisis bagaimana pengaruh kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung yang dipandang dalam perspektif ekonomi islam.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun dipilihnya judul penelitian ini, yaitu dengan alasan sebagai berikut :

1. Secara Objektif

Di Kota Bandar Lampung sumber penerimaan daerahnya berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Yang Di Pisahkan Dan

³Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

⁴ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012), h. 101.

⁵ P3EI. *Ekonomi Islam*. (jakarta: Rajawali Pers. 2011).h. 17

Pendapatan Lain-Lain Yang Sah. Besarnya sumber potensi penerimaan daerah yang dimiliki oleh kotaBandar Lampung dapat membantu pembiayaan pembangunan daerah agar dapat menjadi mandiri. Akan tetapi, kenyataannya pendapatan daerah di kota Bandar Lampung masih di dominasi oleh Dana Perimbangan yaitu dana transferan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yaitu sebesar 57% dan Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 21% pada tahun 2014.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pendapatan daerah kota Bandar Lampung belum sepenuhnya di dapat secara mandiri. Salah satu sumber penerimaan daerah di kota Bandar Lampung yaitu Hasil Kekayaan Yang Di Pisahkan. Dimana selama lima tahun terakhir penerimaan dari Hasil Kekayaan Yang di Pisahkan ini bersifat fluktuatif. Pada tahun 2010 Hasil Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan hanya terealisasi sebesar Rp. 3.449.399.341 dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 3.470.399.34. Sampai pada tahun 2011 penerimaan Hasil Kekayaan Yang Di Pisahkan tidak mencapai target. Tetapi dari tahun 2013 sampai 2014 mencapai target dan pada tahun 2015 menurun dan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Pendapatan daerah yang berasal dari Hasil Kekayaan Yang Di Pisahkan seharusnya dapat meningkatkan pendapatan kota Bandar Lampung melalui laba BUMD, karena BUMD yang berjalan dengan lancar dan baik tentu akan memberikan dampak positif terhadap PAD sehingga perlu adanya peningkatan dalam pengelolaannya. Sehingga hal inilah yang

melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai seberapa besar kontribusi BUMD terhadap PAD serta bagaimana untuk meningkatkannya.

2. Alasan Subjektif

Memberikan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca tentang kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung yang ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam dan juga dari aspek yang penulis bahas, permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas atau diteliti. Disamping itu pula data dari penelitian yang penulis lakukan ini dapat diperoleh melalui beberapa lembaga atau instansi yang terkait dan juga penelitian yang dilakukan oleh penulis ada relevansinya dengan ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi.

C. Latar Belakang Masalah

Era Otonomi Daerah menuntut setiap pemerintah daerah untuk mandiri dan kreatif mencari sumber-sumber pembiayaan serta aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber masukan kas daerah. Otonomi daerah menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

⁶ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.1.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat telah membagi berbagai sumber pembiayaan kepada daerah untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang dilimpahkan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 09 tahun 2015 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Pendukungnya. Menurut ketentuan yang ada dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun Tahun 2014, penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi bersumber dari: (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Dana Perimbangan, (c) Lain-lain Pendapatan.⁷ Dalam hal ini Pemerintah Daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pemerintah daerah berusaha melakukan pengelolaan penerimaan daerah secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah juga harus menjamin semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat secara rinci sehingga dapat terkelola dengan baik.⁸ Dalam Pemerintah Daerah, dukungan keuangan dapat diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah yang merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kemandirian suatu

⁷ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 2, www.djpk.depkeu.go.id

⁸ Konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

daerah otonom dalam menyelenggarakan administrasi pemerintah dan pembangunan.⁹

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰ Isyarat bahwa Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar bagi pelaksanaan Otonomi Daerah menunjukkan bahwa PAD merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam menyelenggarakan dan mewujudkan Otonomi Daerah.¹¹ Semakin besar kontribusi PAD nya maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.¹²

Di Kota Bandar Lampung yang merupakan salah satu wilayah yang mana memiliki potensi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang cukup besar dikarenakan sebagai ibu kota Provinsi Lampung. Meskipun sudah berlakunya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya kinerja keuangan daerah kota Bandar Lampung belum dapat dikatakan mandiri. Hal ini karena beberapa tahun terakhir penerimaan PAD tidak memenuhi target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang

⁹ Baihaqi, "Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu", Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 3 Tahun 2011, h. 248

¹⁰ Aries Djainuri, *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, (Bogor: Gailia Indonesia, 2012), h.88.

¹¹ Bayu Pratama Putra, "Analisis Kontribusi Laba Perusahaan Bumda Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015", Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritime Raja Ali Haji, Tanjung Pinang Kep.Riau, 2016, h.3

¹² Andullah, Dri Asmawanti, dan Febriansyah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan" Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu, Vol3, No.1, (2015), h.42, <http://jafebunib.ac.id>

beresumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dan lain-lain.¹³

Pendapatan Asli Daerah digunakan untuk membiayai pembangunan yang dilakukan setiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dan memajukan daerah tersebut.¹⁴ Besarnya pertumbuhan ekonomi daerah seharusnya merupakan sebuah peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah.¹⁵ Realisasi penerimaan dan Target dari Pendapatan Asli Daerah kota Bandar Lampung selama periode 2010 hingga 2015 yang dapat dilihat dari tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2015

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2010	Rp. 84.167.470.269,17	Rp. 86.692.399.700,41
2	2011	Rp. 156.000.000.000,00	Rp. 162.772.590.331,88
3	2012	Rp. 292.272.049.972,25	Rp. 290.008.025.238,22
4	2013	Rp. 418.111.740.815,52	Rp. 359.628.303.287,61
5	2014	RP. 495.200.463.931,26	Rp. 387.175.943.391,90
6	2015	Rp. 769.108.142.606,24	Rp. 397.236.202.327,45

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Dispenda Kota Bandar Lampung Tahun 2015, Data Diolah.¹⁶

¹³ Widi Angga Kurniawan, 'Flypaper Effeck Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)', h.2.

¹⁴ Berlian Jawa Kesuma, *Analisis Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2012*, (Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang, 2013)h.18

¹⁵ Putu Lia Perdana Sari, "Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali" *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, Vol. 2, No.3 , (2013), h.716, *ejournal.undiksha.ac.id*

¹⁶ Yunita Aprilia, "Analisis Pengaruh Desentralisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Ekonomi Islam (Studi pada kantor PEMDA kota Bandar Lampung)"(Skripsi Program Sarjana S1 Ekonomi Syari'ah IAIN RI Lampung, Bandar Lampung, 2016),h.7

Pada Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan PAD Kota Bandar Lampung pada beberapa tahun belakangan mengalami penurunan atau tidak terealisasi yaitu dari tahun 2012-2015. Pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah yang telah ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp. 292.272,049.472,25 dan hanya terealisasi sebesar Rp. 290.008.025.238,22. Sampai tahun 2015 penerimaan PAD yang telah ditargetkan tidak pernah terealisasi dan hanya sekitar 40% yang dapat terealisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Kota Bandar Lampung belum tergali keseluruhan serta belum optimalnya pengelolaan penerimaan keuangan daerah di Kota Bandar Lampung.

Besarnya potensi PAD di kota Bandar Lampung terlihat dari sudah mulai berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini pula dapat terlihat dari besarnya potensi yang berasal dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan..Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan APBD.¹⁷ Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup yaitu, Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Atau Kelompok Usaha Masyarakat.¹⁸ BUMD adalah perusahaan

¹⁷ Ahmad yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013),h.73-74

¹⁸ Berlian Jawa Kesuma, *Op. Cit.* h.29.

yang diatur dengan suatu peraturan daerah yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat di mana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ada ketentuan lain.

Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian bagi masyarakat di daerah, dimana tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah setelah dikurangi dengan penyusutan dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD.¹⁹

Sebagaimana diketahui bahwa tugas dan peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah mendorong kegiatan ekonomi daerah, menciptakan kesempatan kerja, menyediakan jasa pelayanan sosial dan memberikan kontribusi terhadap PAD.²⁰ Jika pemerintah daerah mampu mengelola secara profesional tidak tertutup kemungkinan BUMD merupakan sumber pendapatan daerah yang potensial.

Di kota Bandar Lampung terdapat 3 Badan Usaha Milik Negara (BUMD) yaitu Perusahaan Daerah (PD) BPR bank pasar , PD BPRS Kota Bandar Lampung dan PDAM (perusahaan daerah air minum way rilau bandar lampung).

¹⁹ Bayu Pratama Putra, *Op.Cit*, h.2

²⁰ IR Purwadi, *Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah* (Surabaya: Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002), h.3.

PD BPR Bank Pasar adalah perusahaan daerah yang melakukan kegiatan ekonomi secara aktif, dengan bergerak dibidang pemberian kredit bagi masyarakat kota Bandar Lampung dan secara tidak langsung, sebagai stimulator bagi lancarnya kegiatan perekonomian masyarakat Kota Bandar Lampung.²¹PD BPRS Kota Bandar Lampung adalah lembaga keuangan perbankan pertama yang berbadan hukum perseroan terbatas yang melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah Islam.²²PDAM Way Rilau adalah Perusahaan Daerah yang menghasilkan output publik yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya, dan Pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan rakyat serta ketenangan kerja dalam Perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Berdasarkan output yang dihasilkan dan tujuan usaha, PDAM Way Rilau cenderung memiliki tujuan usaha yang bermotif sosial. PD BPR Pasar diharapkan mampu membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bandar Lampung.²³

Pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu negara harus menciptakan kondisi ekonomi yang seimbang dimana dapat dinikmati oleh

²¹ Ayu Mutia Sari, *'Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Dalam Memberikan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2001-2006'*, (Skripsi Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2007), h.1.

²²Bank Syariah Bandar Lampung, *Sejarah BPRS Kota Bandar Lampung*, diakses dari banksyariahbandarlampung.co.id pada 8 Juni 2017 pukul 05:43 WIB.

²³PDAM Way Rilau, www.pdamwayrilau.com, diakses tanggal 8 Juni 2017 pukul 05:03 WIB.

setiap lapisan masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya hal yang terjadi sebaliknya. Pembangunan yang dirancang tidak berfungsi untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dikarenakan tidak terealisasinya dana pendapatan asli daerah (PAD) yang sudah ditargetkan.

Peningkatan realisasi PAD sangat mempengaruhi kondisi keuangan suatu wilayah, apabila penerapan tujuan pembangunan tidak sesuai dengan penerapan pembangunan diakibatkan anggaran PAD yang didapatkan tidak mencukupi dikhawatirkan terjadinya pendistribusian yang tidak merata dimana hal tersebut jelas disebutkan bahwa Islam melarangnya karena munculnya ketidakadilan dalam masyarakat terutama masyarakat miskin dan tidak terealisasinya pembangunan dengan baik. Untuk merealisasikannya jelas bahwa segala sumber daya yang ada dikelola dan diolah secara maksimal dimana hal ini dijelaskan dalam Q.S. Hud ayat 61:

وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنْ آلِ أَرْضٍ وَأَسَرَّتْكُمْ فِيهَا فَاٰسَٰتَٰغُفِرُوهُ
ثُمَّ تَوْبُواْ اِلَآيْهِ هَـٰٓ إِنَّ رَبِّىۤ قَرِیْبٌ مُّجِیْبٌ ۚ ٦١

Artinya: Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian

*bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)*²⁴

Dari ayat diatas dijelaskan mengenai ‘pemakmuran bumi/tanah’ dimana terminologi “pemakmur tanah” mengandung pemahaman tentang pertumbuhan ekonomi, sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib kepada seorang gubernurnya di Mesir: *“Hendaklah kamu memperhatikan pemakmuran tanah dengan perhatian yang lebih besar daripada orientasi pemungutan pajak, karena pajak sendiri hanya dapat dioptimalkan dengan pemakmuran tanah. Barangsiapa yang memungut pajak tanpa memperhatikan pemakmuran tanah, negara tersebut akan hancur”*²⁵

Ini artinya dalam mengoptimalkan Pengelolaan kekayaan daerah, pemerintah harus memperhatikan sumber daya yang ada terutama yang dapat dikelola untuk menjadi sumber pendapatan daerah seperti kekayaan mineral, pertambangan, dan lain sebagainya. Seperti di kota Bandar Lampung sendiri yaitu Perusahaan Daerah PDAM Way Rilau, BPR Bank Pasar, dan BPRS kota Bandar Lampung. Ketiga perusahaan daerah yang dimiliki oleh pemerintah ini mengelola sumber daya yang ada guna untuk meningkatkan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian dalam pengoptimalannya sendiri sangat dibutuhkan agar dapat terealisasi penerimaan di negara Islam. Adapun sumber-sumber penerimaan Negara pada zaman Rasulullah SAW diantaranya yaitu Zakat,

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013),h.228

²⁵Nurul Huda dkk, *Op. Cit.* h.124

Ushr, Amwal Fadhila, Wakaf, Nawaib, Shodaqoh, Khumus/Rikaz, Jizyah, Kharaj, Ghanimah, dan lain sebagainya.²⁶ Semua sumber tersebut digunakan untuk membiayai segala bentuk kegiatan wilayahnya untuk mensejahterakan umatnya dan memperluas wilayah Islam pada saat itu. Dikatakan sekarang ini sumber-sumber penerimaan setiap Negara berbeda dengan pada masa Rasul.

Lebih jauh dari hal tersebut, hasil laba BUMD yang juga sebagai sumber penerimaan yang menjadikan juga peran-peran dasar pemerintah daerah dalam alokasi, distribusi dan redistribusi. Sehingga dana penerimaan dari hasil laba BUMD tersebut dapat digunakan untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dalam hal pendistribusiannya sumber pendapatan tersebut harus bersifat adil dan jujur agar merata sehingga memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Agar tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan, dana tersebut maka haruslah memberikan kontribusi yang besar kepada penerimaan daerah.

Melihat penjelasan di atas melihat bahwa BUMD salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah yang mampu untuk membiayai pembangunan membuat peneliti ingin melihat **“PENGARUH KONTRIBUSI BUMD TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA TAHUN 2006-2015”**

²⁶ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005), h. 31

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh kontribusi BUMD terhadap PAD di Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kontribusi BUMD terhadap PAD di Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Seberapa besar kontribusi BUMD terhadap PAD di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap kontribusi BUMD terhadap PAD di Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Akademisi

Untuk pengembangan kemampuan dalam bidang penelitian dan menerapkan teori yang penulis dapatkan di dalam perkuliahan serta syarat untuk menyelesaikan pendidikan yang kini penulis tempuh. Kemudian, untuk menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dan menambah khasanah pengetahuan mengenai pengembangan BUMD

terhadap PAD di wilayah kota bandar lampung dalam perpektif ekonomi islam.

b. Secara Praktisi

Diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu penunjang dalam membuat kebijakan terutama dalam pengembangan BUMD untuk meningkatkan PAD dikota bandar lampung. Kemudian, memberikan wawasan mengenai kontribusi BUMD terhadap peningkatan PAD di kota bandar lampung sehingga masyarakat dapat mengetahui posisi BUMD sebagai pendapatan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Pendapatan Asli Daerah

1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah bagian dari Pendapatan daerah yang merupakan penerimaan kas daerah sebagai sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan dan mengoptimalkan kemakmuran rakyat di segala bidang kehidupan yang didalamnya meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain penerimaan yang sah. PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²⁷

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang tertuang dalam pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, dimana Pendapatan Asli Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih.²⁸ Sedangkan pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari

²⁷ Ahmad yani, *Op.Cit* h. 51-52

²⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah

sumber ekonomi asli daerah, yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah Yang Dipisahkan dan lain-lain.²⁹

Kemudian Aries Djaenuri mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan prundang-undangan yang berlaku.³⁰ Sehingga dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber ekonomi dalam wilayah sendiri yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah dan perundang-undangan.

Pada dasarnya PAD dapat dianggap sebagai indikator kemandirian suatu daerah dalam membiayai kegiatan pembangunannya. Dimana semakin tinggi PAD suatu daerah maka semakin besar kemandirian daerah tersebut, sebaliknya semakin rendah PAD suatu daerah maka semakin tidak mandirinya daerah bersangkutan untuk membiayai pembangunannya. Kecilnya peranan PAD dalam pembiayaan pembangunan daerah mencerminkan lambannya perkembangan lapangan usaha di daerah yang potensial member kontribusi dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah , daerah dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang

²⁹ Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Lok. Cit*, h. 101.

³⁰ .Aries Djaenuri, *Lok. Cit*, h.88

menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan dilarang menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor. Yang dimaksud dengan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi adalah peraturan daerah yang mengatur pengenaan pajak dan retribusi oleh daerah terhadap objek-objek yang telah dikenakan pajak oleh pusat dan provinsi sehingga menyebabkan menurunnya daya saing daerah.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu dengan menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipisahkan) oleh wajib pajak membayar menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.³¹ Pajak daerah, sebagai

³¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : PT. Grafindo Pustaka, 2007), h.80

salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Menurut ketetapan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2015 pasal 1 pajak daerah dan dalam buku Darwin tentang jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut³² :

- 1) Pajak Hotel . Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk fasilitas penginapan, pelayanan pengunjung, dan jasa persewaan gedung untuk kegiatan atau pertemuan di hotel.
- 2) Pajak Restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- 3) Pajak Hiburan. Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut biaya.
- 4) Pajak Reklame.. Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.
- 5) Pajak Penerangan Jalan. Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

³² Drs. Darwin., MBP, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), h. 119-128

- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. Objek pajak pengambilan bahan galian golongan c adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan c.
- 7) Pajak Parkir. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah menurut Mardiasmo adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.³³ Retribusi daerah, sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pemungutan disesuaikan dengan pemakaian usaha dan jasa yang diberikan oleh pemerintah.³⁴ Adapun Retribusi Daerah terdiri dari :³⁵

³³ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revis Tahun 2011*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET,2011), h.15

³⁴ Gusfahmi, *Op.Cit*, h. 15

³⁵ Ahmad yani, *Op.Cit*, h. 64-71

1) Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis-jenis retribusi jasa umum yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Dan Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2) Retribusi Jasa Khusus

Retribusi Jasa Khusus adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh pihak swasta. Jenis-jenis retribusi jasa khusus yaitu, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir Dan/Atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Villa, Retribusi Penyedotan Kakus, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal, Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga, Retribusi Penyebrangan Di Atas Air, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek.

c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan

Hasil penerimaan perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yaitu hasil penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha milik masyarakat misalnya antara lain, bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro).³⁶

³⁶Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ini di beberapa daerah, misalnya didapatkan dari sumber berikut : Hasil penjualan barang milik daerah; Jasa giro; Sumbangan pihak ketiga; Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah; setoran kelebihan pembayaran kepada pihak ketika; denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah;³⁷ pendapatan denda pajak; pendapatan denda retribusi, fasilitas sosial dan umum; pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan; pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.³⁸

3. Pendapatan Asli Daerah dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sebagai sebuah ajaran hidup yang lengkap, Islam memberikan petunjuk atas semua aktivitas manusia, termasuk ekonomi. Oleh karenanya tujuan diturunkannya syari'at Islam, yaitu untuk mencapai *falah* (kesejahteraan/keselamatan) baik dunia maupun akhirat. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut tugas pemerintah haruslah dapat menjamin kepentingan sosial masyarakatnya dengan cara memenuhi kepentingan publik untuk rakyatnya.

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggung jawab pemerintah, Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *Public utilities* (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial.³⁹

³⁷ Aries Djaenuri, *Op.Cit*, h.99

³⁸ Ahmad yani, *Op.Cit*, h.74

³⁹ Nurul Huda dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012),h. 1

Dalam pemikiran Islam menurut An-Nabahan dalam Adi, Pemerintah merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggung jawab terhadap perekonomian.⁴⁰

Untuk mewujudkan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sebagai tanggung jawab pemerintah agar menciptakan kesejahteraan, pemerintah memiliki kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatur pemerintahannya. Tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam adalah untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yang tinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi, ekonomi Islam akan dikelola untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang.⁴¹

Pada masa Islam, Pemerintah menggunakan biaya-biaya untuk melakukan pembangunan sebagai salah satu tanggung jawab terhadap masyarakat agar dapat terus merasa sejahtera. Terkait pembiayaan sektor publik oleh Negara, adapun sumber-sumber pendapatan Negara di zaman Rasulullah SAW, sebagai berikut :

⁴⁰ Nurul Huda, et al, *Op.Cit*, h. 193

⁴¹ *Ibid*, h. 191

a. Zakat

Zakat adalah sebagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan kepada pemerintah/pengurus kaum muslimin, untuk membiayai kebutuhan bersama terutama menyangkut pengembangan SDM. Pada periode Makkah zakat disyariatkan sebagai anjuran yang bersandar pada kesadaran pribadi Muslimin akan perlunya membentuk sebuah masyarakat atau umat yang berkeadilan dengan jalan membebaskan kemiskinan dan kekafiran lainnya. Sedangkan pada periode Madinah, pungutan zakat menjadi wajib dan diambil alih oleh pemerintah dengan menugaskan amil atau petugas pemungut.⁴² Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam QS. Al- Baqarah (2) ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

“Artinya : Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”⁴³

b. Kharraj

Sumber pendapatan yang pertama kali diperkenalkan di zaman Rasulullah SAW, adalah *kharraj*. *Kharraj* adalah pajak terhadap tanah , atau di Indonesia setara dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan yang mendasar antara sistem PBB dengan sistem *Kharraj* adalah bahwa *Kharraj* ditentukan berdasarkan tingkat produktivitas dari

⁴² Nurul Huda dkk, *Op. Cit*, h. 25-26

⁴³ Kementrian Agama RI, *Op. Cit*, h. 7

tanah (*Land Productivity*) bukan berdasarkan *Zoning*.⁴⁴ Hal ini berarti bahwa bisa jadi untuk tanah yang berseblahan sekalipun misalnya di satu sisi ditanami anggur sedangkan di sisi lain ditanam kurma, maka mereka harus membayar jumlah *Kharraj* yang berbeda.

c. Khums

Para ulama *Syi'i* mengatakan bahwa sumber pendapatannya apapun harus dikenakan *Khums* sebesar 20%, sedangkan ulama *Sunni* beranggapan bahwa ayat ini hanya berlaku untuk harta rampasan perang saja. Imam Abu Ubaid dalam *Adi* menyatakan bahwa yang di maksud *Khums* ini bukan saja hasil perang, tetapi juga barang temuan dan barang tambang.⁴⁵

d. Ghonimah dan Fa'i

Jika tanah dan harta lain diperoleh dari peperangan disebut *Ghonimah*, jika pergantian pemerintahan tidak dengan peperangan tetapi mungkin dengan kudeta atau memengkan pemilu, penyerahan secara damai Negara jajahan dan cara-cara lain maka tanah Negara dan harta benda lainnya disebut *Fa'i*.⁴⁶

e. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dibayar oleh orang-orang non-muslim sebagai pengganti fasilitas sosial-ekonomi dan layanan kesejahteraan lainnya, serta untuk mendapatkan perlindungan keamanan dari Negara

⁴⁴Adiwarman Karim, *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2015),h.264

⁴⁵*Ibid*,h. 264

⁴⁶Nurul Huda dkk,*Op.Cit*, h. 30

Islam. *Jizyah* sama dengan Pull Tax, karena orang-orang non-muslim tidak mengenal zakat fitrah. Jumlah yang harus dibayar sama dengan jumlah minimum yang dibayar oleh orang Islam. Seperti dijelaskan dalam Kitab Suci Al-Qur'an Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى
يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*“Artinya : Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),(yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunjuk”.*⁴⁷

f. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat diantaranya yaitu ada yang disebut *Kaffarah*, yaitu denda misalnya denda yang dikenakan kepada suami istri yang berhubungan di siang hari pada bulan puasa. Mereka harus membayar denda dan denda tersebut masuk dalam pendapatan Negara.⁴⁸

Menurut Huda, Disamping penerimaan Negara yang pokok, pemerintah Negara Muslim juga memiliki sumber pendapatan lainnya seperti *Wakaf* (pemberian aset abadi dari rakyat untuk kebutuhan publik

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *Log.Cit*, h. 191

⁴⁸ Adiwarmar Karim, *Op.cit*, h. 266

yang terbatas maupun tidak terbatas, lalu *Kalalah* (bagian Negara dari warisan), dan barang temuan, harta karun, dan lainnya.⁴⁹ Jika kebutuhan publik belum terpenuhi, Negara dapat memungut pajak tambahan. Negara juga dapat menerbitkan surat utang baik kepada rakyat maupun Negara lain yaitu *Sukuk*.⁵⁰

B. Konsep Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan negara, hanya saja dalam skala daerah. Paling tidak diantara keduanya tidak terdapat perbedaan dalam fungsi dan tujuan pendiriannya. Keduanya sama-sama mengemban misi pembangunan melalui pelayanan terhadap masyarakat dan merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Satu-satunya perbedaan diantara keduanya adalah BUMN dikelola oleh departemen sedangkan BUMD oleh Pemerintah Daerah.⁵¹

Perusahaan daerah atau BUMD sendiri merupakan perusahaan yang didirikan oleh pemerintah daerah yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik pemerintah daerah.⁵² Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014, pemerintah daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana

⁴⁹ Nurul Huda dkk, *Op.Cit*, h.35

⁵⁰ Nurul Huda dkk, *Op.Cit*, h.35

⁵¹ Wawan Sukmana dan Irman Firmansyah, *Analisis Problematika Kinerja BUMD Non-Keuangan di Jawa Barat: Aplikasi Metode Analytic Network Proses*, Skripsi Fakultas Ekonomi, UNoversitas Siliwangi, tahun 2014

⁵² UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 1 angka 40.

dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan oleh pemerintah daerah dan pendiriannya ditetapkan dengan perda.⁵³ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah no 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Persero).⁵⁴

Pendirian BUMD sendiri adalah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. BUMD juga memiliki fungsi dan peran ganda sebagai lembaga profit yang diharapkan mendapatkan deviden semaksimal mungkin untuk pendapatan daerah.⁵⁵ Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah.⁵⁶ Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah itu

⁵³ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 1 dan 2.

⁵⁴ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 3.

⁵⁵ Sugeng Rianto, *Perusahaan Daerah, Eksistensi, Peran, dan Fungsinya* (Semarang: Suara Merdeka, 27 Maret 2017)

⁵⁶ Megafury Apriandhini dan Widyasari Laporan Penelitian Dosen Pemula : Pengurusan Terhadap Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Tinjauan Yuridis Terhadap BUMD), (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014), h.5

sendiri.⁵⁷ Sekaligus sebagai lembaga yang memiliki peran social yang juga dituntut memaksimalkan peran sosialnya terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Perusahaan Daerah sebagai sarana kelengkapan daerah memiliki fungsi dan peran yang tidak ringan, sebab antara peran sebagai lembaga yang harus memberikan pelayanan social sering terjadi benturan kepentingan.⁵⁸Selain itu, keberadaan BUMD sendiri juga bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpimpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan asas-asas ekonomi yang sehat.⁵⁹

Pemerintah pemegang hak atas segala kekayaan dan usaha Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan (BUMD).⁶⁰Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat sebagai sumber pemasukan. BUMD juga merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dari lapisan masyarakat

⁵⁷ Bayu Pratama Putra, *Analisis Kontribusi Laba Prubahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, h.9

⁵⁸ Sugeng Rianto, *Loc. Cit.*

⁵⁹ Megafury Apriandhini dan Widyasari, *Loc. Cit.*

⁶⁰ Megafury Apriandhini dan Widyasari, *Op. Cit.* h.13

yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Ini berarti bahwa memberdayakan itu adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaannya.

Khusus dalam hal BUMD, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaannya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan BUMD secara professional dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance* serta sesuai dengan tujuan didirikannya sebuah badan usaha sebagai sebuah badan usaha yang didirikan untuk melayani kepentingan publik atau masyarakat, perlu dilakukan sinkronasi dan harmonisasi produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan BUMD.

BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan

tugasnya maupun sebagai perekonomian daerah.⁶¹Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.⁶²

Alternatif model pengelolaan BUMD dalam rangka mewujudkan *good corporate governance* dapat dilakukan dengan menggunakan konsep pengelolaan BUMD non persero dengan konsep 'swakelola mandiri'.Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan intervensi kebijakan dengan menerbitkan baik peraturan gubernur/walikota/bupati yang secara substansi mengatur tentang rencana strategis BUMD tersebut.⁶³

2. Sumber Modal BUMD

Sumber modal BUMD terdiri dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya yang terdiri dari kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset, dan agio saham.⁶⁴Penyertaan modal tersebut harus ditetapkan dengan Perda.Penyertaan modal juga dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembentukan BUMD maupun penambahan modal BUMD, baik berupa uang ataupun barang milik daerah. Terkait dengan barang milik daerah yang disertakan, harus dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah tersebut akan dijadikan penyertaan modal.⁶⁵

⁶¹Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014) h.15.

⁶²*Ibid.*

⁶³ Megafury Apriandhini dan Widyasari, *Op.Cit*, h.15

⁶⁴ UU N0 23 Tahun 2014 Pasal 332

⁶⁵ UU No 23 tahun 2014 Pasal 333

Perusahaan Daerah yang bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan-peraturan yang mengatur pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak di daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dalam hal APBD diperkirakan surplus dapat digunakan untuk penyertaan modal (investasi daerah) dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Permendagri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, bahwa Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; meningkatkan pendapatan daerah; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁶ Secara umum tujuan BUMD adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pendapatan daerah.

Berdasarkan Permendagri No. 52 Tahun 2012, dijelaskan bahwa investasi pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau

⁶⁶ Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014) h.15

barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha. Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk: meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah; meningkatkan pendapatan daerah; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶⁷

Dalam struktur pendapatan daerah terdapat komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.⁶⁸ Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan publik yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun pada kenyataannya, hasil yang diperoleh dari aset yang dipisahkan ini sangat minim, sehingga investasi yang dilakukan secara terus menerus justru hanya seperti membebani APBD dan tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal pada BUMD merupakan bagian dari investasi jangka panjang daerah, yang jumlah akumulatifnya disajikan dalam neraca pada sisi aset. Dalam penganggarannya, penyertaan

⁶⁷Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012.

⁶⁸ Adi Suhendra Subandrio, *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utara Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 2009, h.6

modal atau investasi ini tidak diakui sebagai belanja, namun dimasukkan sebagai pengeluaran pembiayaan. Di sisi lain, hasil yang diterima dari investasi yang telah dilakukan dikategorikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kebijakan umum APBD (KUA) akan memuat informasi tentang pendapatan dan pembiayaan ini.

Ada beberapa persoalan dalam hal pengelolaan keuangan daerah, diantaranya adalah:

a. Urgensi penyertaan modal Pemerintah Daerah.⁶⁹

Salah satu tujuan pembentukan BUMD adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan pendekatan bisnis. Meski BUMD dibentuk untuk mencari keuntungan, namun tanpa harus menghilangkan aspek pelayanan publik. BUMD tidak mendapat saingan dari investasi swasta karena bidang usaha yang dijalankannya membutuhkan modal besar dan masa pengembalian investasi yang membutuhkan waktu sangat lama.

b. Makna Pemda sebagai pemilik BUMD/Pemodal terkait dengan manajemen dan pengawasan BUMD.

Pemda sebagai pemilik BUMD bisa selaku pemilik penuh apabila keseluruhan modal BUMD bersumber dari Pemda. BUMD dengan pemilik tunggal ini berbentuk perusahaan umum (Perum), sementara jika Pemda

⁶⁹ Mesti Wilhelmina Nisriana Manefa dan Frits Oscar Fanggidae, *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Strategis Akuntansi dan Pelaporan Pemerintahan Kabupaten Rotendao*, (Indonesia: Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia, 2015), h.2.

bukan pemilik tunggal bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas (PT).Pemda sendiri melakukan investasi setelah menganggarkan terlebih dahulu dalam Perda APBD komponen pembiayaan berupa penyertaan modal daerah/investasi.Oleh karena itu, penyertaan modal ini harus memperoleh persetujuan dulu dari lembaga perwakilan daerah (DPRD).

c. Besaran bagi hasil/deviden yang diperoleh Pemda dari investasinya di BUMD.

BUMD sebagai sumber pendapatan daerah secara legal formal diakui dalam peraturan perundang-undangan, sehingga muncul rekening “Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD)”⁷⁰ (Lampiran A.IV Permendagri Nomor 13 Tahun 2006). Namun, hal ini juga bermakna bahwa jika BUMD tidak memperoleh laba, maka Pemda juga tidak akan memperoleh PAD dari BUMD tersebut. Dengan demikian, besaran PAD yang diperoleh Pemda dari BUMD tergantung pada besaran laba yang diperoleh BUMD.Dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2010 disebutkan bahwa BUMD tidak boleh dibebani target PAD apabila BUMD masih merugi atau “berada” dalam upaya mendukung program Pemerintah berupa penyediaan air bersih (khusus bagi PDAM).

3. Ciri-ciri BUMD

⁷⁰ Lampiran A.IV Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

Pada UU No 23 tahun 2014 juga dijelaskan bahwa bentuk hukum BUMD terdiri dari Perumda dan Perseroda. Ciri-ciri Perumda sebagaimana diatur pada pasal 334 sampai pasal 338 sebagai berikut:⁷¹

a. Pemodalan

Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal ini perumda dimiliki oleh lebih dari satu daerah, Perumda tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perseroda. Perumda juga dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

b. Organisasi

Organisasi dalam Perumda terdiri atas kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal, direksi, dan dewan pengawas.

c. Laba

Laba Perumda ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah. Laba yang menjadi hak daerah disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh kepala daerah sebagai pemilik modal. Laba tersebut dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah, dengan tujuan *reinvestment* berupa penambahan, peningkatan, dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan.

d. Restrukturisasi

⁷¹ UU No 23 Tahun 2014 Pasal 334-338.

Perumda dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional.

e. Pembubaran Perumda

Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda. Kekayaan Perumda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Sedangkan Perseroda diatur di dalam Pasal 339 sampai dengan Pasal 342 yang mana ciri-cirinya sebagai berikut:

a. Permodalan

Perseroda adalah BUMD yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu daerah. Setelah pendiriannya ditetapkan dengan Perda, selanjutnya pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

Modal Perseroda terdiri dari saham-saham, dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan daerah terdiri atas beberapa daerah dan bukan daerah, salah satu daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Perseroda dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Pembentukan anak perusahaan tersebut didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang professional dan independen.

b. Organisasi

Organisasi dalam perseroda terdiri atas RUPS, direksi, dan komisaris.

c. Pembubaran

Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Secara garis besar, ciri-ciri BUMD sendiri adalah:

- a) Di dirikan berdasarkan peraturan daerah (perda)⁷²
- b) Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.⁷³
- c) Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam pemodalan perusahaan.
- d) Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
- e) Bertujuan memupuk pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.
- f) Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang melayani kepentingan umum selain mencari keuntungan sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat sebagai sumber pemasukan.⁷⁴

⁷² UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 1 dan 2.

⁷³ Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar, 2014) h.18

⁷⁴ *Ibid.* h.18

- g) Modalnya dapat berupa saham atau obligasi. Bagi perusahaan yang go publik dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun nonbank.⁷⁵
- h) Direksi bertanggung jawab penuh atas perusahaan dan mewakili perusahaan di pengadilan.⁷⁶
- i) Masa jabatan direksi selama empat tahun, dan
- j) dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah atas pertimbangan DPRD

4. Unsur-unsur Pengelolaan BUMD

UU No. 23 Tahun 2014 juga memaparkan unsur-unsur yang harus diatur pada ketentuan lebih lanjut terkait pengelolaan BUMD setiaknya harus memuat:⁷⁷

- a. Tata cara penyertaan modal.
- b. Organ dan kepegawaian.
- c. Tata cara evaluasi.
- d. Tata kelola perusahaan yang baik.
- e. Perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan.
- f. Kerjasama.
- g. Penggunaan Laba.
- h. Penugasan Pemerintah Daerah.
- i. Pinjaman.

⁷⁵ Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014) h.18

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ UU No 23 Tahun 2014 Pasal 343

- j. Satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya.
- k. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi.
- l. Perubahan bentuk hukum.
- m. Kepailitan.
- n. Penggabungan peleburan dan dan pengambilalihan.

5. Tujuan Pendirian BUMD

Badan usaha milik daerah (BUMD) bertujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dan seluas-luasnya demi meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Untuk lebih jelasnya tujuan dari pendirian BUMD sendiri adalah sebagai berikut:⁷⁸

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- d. Perintis kegiatan-kegiatan usaha⁷⁹
- e. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.⁸⁰

⁷⁸ UU No 23 Tahun 2013, Pasal 331 angka 4

⁷⁹ Wahyu Maizal, *Op. Cit*, h.16

⁸⁰ *Ibid.* h.17

- f. Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat.⁸¹

6. Fungsi BUMD

Fungsi badan usaha milik daerah (BUMD) adalah sebagai fasilitator dalam menjalankan otonomi daerah, yang berfungsi membantu pemerintah daerah dalam menjalankan pemerintahannya yang berlandaskan pada otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah harus dapat membiayai rumah tangganya sendiri dengan mengandalakan pendapatan asli daerah, salah satu aset daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mempunyai tujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya yang nantinya akan diberikan sebagian kepada pemerintah dalam hal peningkatan pendapatan asli daerah.

7. Jenis-jenis BUMD

- a. BUMD yang terfokus pada pencarian laba (profit)

Badan Usaha Milik Daerah yang termasuk jenis ini adalah perusahaan yang fokus pada memaksimalkan laba seperti BUMD Perbankan, BUMD Pertambangan, BUMD Properti, BUMD Konstruksi, BUMD Air Minum, BUMD telekomunikasi, BUMD Energi, BUMD Manufaktur, dan BUMD Pasar.

- b. BUMD yang terfokus pada pelayanan publik.

⁸¹*Ibid.*

Badan Usaha Milik Daerah jenis ini adalah badan usaha yang memfokuskan diri pada pelayanan untuk masyarakat luas seperti BUMD transportasi umum dan BUMD Rumah Sakit.

- c. BUMD yang terfokus pada investasi baru yang tidak mungkin dikerjakan oleh swasta.

Badan Usaha Milik Daerah jenis ini adalah seperti jalan untuk kawasan terpencil, deep tunner untuk air minum kota, atau proyek-proyek raksasa seperti proyek banjir kanal.

8. Kinerja BUMD

Menurut Racmawati (2004) yang dimaksud kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu. Kinerja BUMD yang dimaksudkan sebagai kesehatan perusahaan/badan usaha dalam rangka kemamperumda puannya untuk:

- a. Membayar hutang-hutangnya terutama jangka pendek
- b. Menghasilkan keuntungan
- c. Aktiva/kekayaannya cukup/lebih besar dari hutang-hutangnya.

Ukuran kinerja BUMD yang dilakukan berdasarkan data keuangan telah bertahun-tahun menjadi pedoman BPKP untuk menyatakan BUMD sehat atau tidak sehat.

9. Optimalisasi Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) dalam Perspektif Ekonomi Islam

BUMN/BUMD merupakan alat yang sangat penting bagi pemerintah, baik untuk menciptakan pendapatan Negara maupun memengaruhi prekonomian. Dengan BUMN/BUMD pemerintah dapat menjalankan kebijakan-kebijakan ekonomi umumnya lebih mudah, karena BUMN/BUMD milik pemerintah pada umumnya lebih dari satu dan menguasai seluruh lini prekonomian.

Dalam perkembangan zaman, Negara dengan kompleksitas permasalahannya tidaklah mungkin hanya seorang kepala Negara yang menurut semua peristiwa dan mengambil kebijakan secara langsung. Ada pihak-pihak lain yang menanganinya. Hal ini jauh berbeda seperti manajemen di zaman Rasulullah SAW. Dan sahabat. Mereka dengan syura sudah mampu menyelenggarakan persoalan Negara di suatu tempat yaitu masjid.

Dalam praktiknya, Islam telah memberikan petunjuk lewat sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia itu berserikat atas tiga hal, yaitu api, air dan padang rumput.

Salah satu lembaga BUMN/BUMD di bawah kendali langsung Nabi SAW, adalah *Baitulmal*. Satu-satunya lembaga yang mempunyai sejarah panjang peradaban ekonomi Islam. Rasulullah dan para sahabat menjadikan pusat pengendalian ekonomi tersebut sebagai alat kontrol dan alat pengumpul zakat serta pajak Negara.⁸² Tentunya peran *baitul mal* saat

⁸² Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoritis dan Sejarah)*, (Jakarta : Kencana, 2016), h. 326

ini hanyalah sekedar instrumen distribusi zakat atau pajak dan sebagai ghanimah yang telah terkumpul untuk kemudian dibagikan kepada rakyat.

Namun berbeda dengan ini, BUMN/BUMD di zaman ini tidak hanya berperan dalam pengendalian ekonomi atau sosial semata, tetapi lebih jauh adalah juga sebagai sumber pembiayaan Negara dengan menghasilkan produk pelayanan yang biasanya tersebar dalam barang dan jasa. Pemerintah pula harus dapat mengawasi BUMN/BUMD agar tidak menjadi pemain utama dalam perekonomian dan menguasai pasar secara monopolistic sehingga merugikan pihak-pihak swasta lainnya. Hal ini harus segera di evaluasi dengan penegak syariat Islam Negara tersebut sebab akan terjadinya KKN dan tidak optimalnya pengelolaan hasil BUMN/BUMD dikarekan pemilihan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Abu Ubaid (155-224 H) andil Negara begitu besar dalam perekonomian, karena tugas Negara adalah menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang disyariatkan, seperti penerapan zakat dapat mengikis kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui pengaturan administrasi keuangan Negara selektif, sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat yang pada akhirnya terselenggara kegiatan perekonomian yang berkeadilan.

C. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis juga mengambil referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran untuk mempermudah proses penelitian.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya, antara lain:

1. Edir Sugiarto tahun 2016 dengan judul “Analisis Kontribusi Perusahaan Daerah Pasar Terhadap Peningkatan Asli Daerah Di Kabupaten Lamongan” hasil penelitian menunjukkan pada tahun 2010 di dapat kriteria relative tidak berkontribusi, tahun 2011 kurang berkontribusi, tahun 2013 berkontribusi, dan tahun 2014 kurang berkontribusi.
2. Bayu Pratama tahun 2016 dengan judul “Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015” dengan hasil penelitian bahwa BUMD memiliki kontribusi terhadap PAD di Tanjung Pinang dimana setiap tahunnya bersifat fluktuatif di tahun 2010-2015.
3. Putu Era Fitriani, Wayan Cipta, dan I Ketut Kirya, tahun 2015 dengan judul “Analisis Rasio Efektivitas dan Kontribusi Laba Perusahaan Daerah Terhadap PAD Kabupaten Buleleng Tahun 2009-2013” dengan hasil penelitian bahwa rata-rata tingkat efektivitas laba perusahaan daerah kabupaten Buleleng tergolong efektif kecuali pada tahun 2010 dan 2013 yang belum mencapai target. Kemudian, kontribusi laba perusahaan daerah terhadap PAD selama periode 2009-2013 secara umum mengalami fluktuasi.

4. Umaruddin Usman tahun 2013 dengan judul “Analisis Pengaruh Hasil Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Utara” menggunakan metode penelitian regresi sederhana. Hasil penelitian menyatakan bahwa laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD di Aceh Utara.

D. Kerangka Pemikiran

Pembangunan daerah merupakan seluruh pembangunan yang dilaksanakan di daerah dan meliputi aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong serta partisipasi masyarakat secara aktif. Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik jangka panjang, maupun jangka pendek. Untuk memperlancar pembangunan daerah maka diperlukannya suatu dana yang berasal dari penerimaan daerah yaitu salah satunya berasal dari laba BUMD.

BUMD merupakan asset pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. BUMD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi.

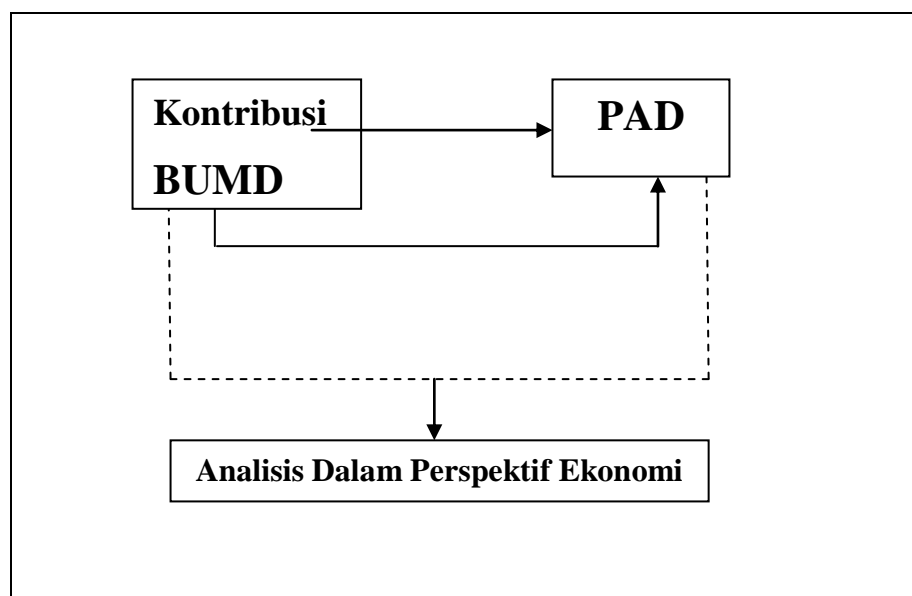
Pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah sendiri, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Jadi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemerintah daerah harus meningkatkan sumber-sumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana BUMD merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pajak daerah.

Dengan demikian BUMD merupakan komponen yang berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Bandar Lampung.

Penelitian ini menguji pengaruh kontribusi BUMD terhadap pendapatan asli daerah kota Bandar Lampung yang ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan adalah BUMD dan variabel dependen yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Berikut merupakan skema kerangka pemikiran mengenai Pengaruh dan kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam Di Kota Bandar Lampung

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan⁸³. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

1. Hubungan Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan otonomi. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah no 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. BUMD itu sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu perusahaan umum daerah (Perumda) dan perusahaan perseroan daerah (Perseroda).⁸⁴

Pendirian BUMD sendiri adalah untuk pengembangan dan pembangunan potensi ekonomi di daerah yang bersangkutan. BUMD juga memiliki fungsi dan peran ganda sebagai lembaga profit yang diharapkan mendapatkan deviden semaksimal mungkin untuk pendapatan daerah.⁸⁵ BUMD merupakan asset pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan

⁸³ Arfida, *Ekonomi Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 51

⁸⁴ UU No. 23 Tahun 2014, Pasal 331 angka 3.

⁸⁵ Sugeng Rianto, *Perusahaan Daerah, Eksistensi, Peran, dan Fungsinya* (Semarang: Suara Merdeka, 27 Maret 2017)

daerah. BUMD merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan optimalisasi.

Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah itu sendiri.⁸⁶ Sekaligus sebagai lembaga yang memiliki peran social yang juga dituntut memaksimalkan peran sosialnya terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Selain itu, keberadaan BUMD sendiri juga bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka ekonomi terpinpin untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan asas-asas ekonomi yang sehat.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Bayu Pratama tahun 2016 dengan judul “Analisis Kontribusi Laba Perusahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015” dengan hasil penelitian bahwa BUMD memiliki kontribusi terhadap PAD di Tanjung Pinang dimana setiap tahunnya bersifat fluktuatif di tahun 2010-2015.

Sehingga berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang sudah dijelaskan maka dapat dilihat hubungan antara variabel independen (Kontribusi BUMD) terhadap dipenden (PAD) sebagai berikut :

⁸⁶ Bayu Pratama Putra, *Analisis Kontribusi Laba Prubahaan BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, h.9

Ho : kontribusi BUMD tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

Ha : kontribusi BUMD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.⁸⁷

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*Field Research*). yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Penelitian ini menggali data yang bersumber dari instansi yang terkait yaitu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Bandar Lampung.

Peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library reseach*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur(kepustakaan) yaitu penelitian yang bertujuan mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan penelaahan terhadap beberapa buku yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dan BUMD, data dari Dinas yang terkait seperti data dari Badan Pengelolaan Keuangan

⁸⁷Sugiyono, *Op.Cit* ,h.11.

dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota Bandar Lampung serta data dari jurnal dan artikel.⁸⁸ Yang berkaitan dengan BUMD dan PAD di daerah kota Bandar Lampung.

B. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang sedang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada.⁸⁹ Karena dalam penelitian ini memberikan gambaran tentang kontribusi dari BUMD terhadap PAD.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam usaha untuk mencari kebenarannya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data Kuantitatif merupakan data-data yang penyajiannya dalam bentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan/*scoring*.⁹⁰ Data-data kuantitatif dalam penelitian ini menganalisis tentang Pengaruh kontribusi BUMD terhadap PAD di kota Bandar Lampung secara parsial ditinjau dalam persepektif Ekonomi Islam.

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (dihasilkan pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan

⁸⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.5.

⁸⁹Moh. Prabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), h.10.

⁹⁰Sugiyono, *Op.Cit*, h. 6

pengelolanya tetapi dapat dimanfaatkan oleh penelitian tertentu.⁹¹Data sekunder berasal dari sumber internal maupun eksternal. Dalam hal ini, data sekunder yang bersifat internal didapat melalui data-data dari BPKAD dan BPPRDkota Bandar Lampung yaitu data total PAD dan data total BUMD kota Bandar Lampung

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, Untuk mengumpulkan data dan informasi penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan jalan melihat, membaca, mempelajari, kemudian mencatat data yang sudah ada hubungannya dengan objek penelitian. Metode ini dilakukan dengan mengambil dokumentasi atau data yang mendukung penelitian, seperti total PAD kota Bandar Lampung, total nilai BUMD diBPKAD dan BPPRDKota Bandar Lampung.

E. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁹² Dalam hal ini, populasi yang menjadi objek penelitian adalah keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung dan BUMD Kota Bandar Lampung dari tahun berdirinya hingga sekarang.

⁹¹*Ibid*, h.138

⁹²Sugiono.*Op.Cit.* hlm 117

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dinamakan penelitian sampel apabila kita bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel atau mengangkat kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.⁹³ Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu.⁹⁴ Dalam penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* maka ditetapkan oleh peneliti beberapa kriteria yang digunakan sebagai sampel yaitu data realisasi PAD dan data realisasi laba BUMD sepuluh tahun terakhir yang telah tersusun dalam bentuk laporan APBD di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandar Lampung yaitu tahun 2006-2015.

F. Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel pertama merupakan variabel independen yaitu Kontribusi BUMD. Variabel yang kedua adalah variabel dependen, variabel dependen adalah PAD (Pendapatan Asli Daerah).

1. Variabel Bebas (X) (*Variabel Independen*)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat),

⁹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, h.174

⁹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, dan Penelitian Evaluasi*, Alfabeta, Bandung, 2015, h.156

variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus*, *predictor*, *antecedent*.⁹⁵ Variabel independen dalam penelitian ini adalah Kontribusi BUMD.

2. Variabel Terikat (Y) (*Variabel Dependen*)

Variabel terikat atau sering disebut dengan variabel output, kriteria, konsekuen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.⁹⁶ Dalam penelitian ini objek variabel terikat yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Bandar Lampung.

Kedua variabel baik dependen maupun independen dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Daftar Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Rumus	Skala Pengukuram
Kontribusi BUMD (X)	Total Laba BUMD dan Total PAD	$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$	Rasio (%)
Pendapatan Asli Daerah (Y)	Total Pendapatan Asli Daerah	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan + lain-lain dari pendapatan asli daerah yang sah	Rasio (Rp)

⁹⁵Sugioni, Loc. Cit.

⁹⁶*ibid.*

G. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul, maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisa ini penulis menggunakan metode deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit, kemudian fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang umum kongkrit ditarik generalisasi yang mempunyai sifat khusus⁹⁷.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian agar dapat diinterpretasikan dan mudah dipahami adalah: Penelitian ini melakukan uji analisis dengan mengumpulkan data-data, kemudian menginterpretasikan pada hasil-hasilnya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Metode analisis deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sedangkan analisis deskriptif kuantitatif merupakan teknik penganalisisan data yang menggunakan angka-angka untuk menarik kesimpulan dari kejadian-kejadian yang dapat diukur.⁹⁸ Dalam hal ini adalah dengan melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan penelitian. Penelitian deskriptif kuantitatif menyajikan data tentang kontribusi hasil laba BUMD terhadap PAD. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data sebagai berikut:

⁹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach* (Yogyakarta: ANDI, 2002), h. 42.

⁹⁸ Arikunto, S, *Metodelogi Penelitian : Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 65

1. Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan laba BUMD dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan dari laba BUMD dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun rumus kontribusi :

$$P_n = \frac{QX_n}{QY_n} \times 100\%$$

Sumber : Buku Manajemen Keuangan Daerah.⁹⁹

Keterangan :

P_n = Kontribusi penerimaan BUMD terhadap PAD (Rupiah)

QY = Jumlah penerimaan PAD (Rupiah)

QX = Jumlah penerimaan hasil laba BUMD (Rupiah)

N = Tahun (periode tertentu)

Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar kontribusi hasil laba BUMD terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2010-2015, didapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Untuk menilai criteria kontribusi dari laba BUMD dapat terlihat pada tabel 1.3 :

⁹⁹Abdul Halim, *Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2004), h.

Tabel 3.2

Klasifikasi Kreteria Kontribusi

Klasifikasi Kontribusi	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991.¹⁰⁰

2. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti ini menggunakan analisis regresi linier untuk membandingkan dua variabel yang berdeda. Dimana dalam uji asumsi klasik ini menggunakan Uji Normalitas.

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Dalam penelitian ini akan menggunakan program SPSS dengan pengujian kolmogrov-smirnov dengan tingkat signifikasi/*level of signification* (α) sebesar 5% atau 0.05.¹⁰¹ adapun hipotesa yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah :

Ho :Data terdisribusi Normal (Ho diterima)

¹⁰⁰Reza Arditia, *Loc.Cit*, h.11

¹⁰¹Suyanto Danang, *Analisis Validitas & Asumsi Klasik*, Dwi (Pustaka, Jakarta : 2011) hlm. 29

Ha :Data tidak terdistribusi Normal (Ho ditolak)

Dasar pengambilan keputusan penerimaan dan penolakan Ho adalah sebagai berikut:

Ho diterima jika nilai probabilitas/*p-value* pada kolom *Asymp.Sig. (2-tailed)* > *level of significance* (α) (0,05).

Ho ditolak jika nilai probabilitas/*p-value* pada kolom *Asymp.Sig. (2-tailed)* \leq *level of significance* (α) (0,05)¹⁰².

3. Analisis Regresi linier Sederhana

Teknik analisis data penelitian ini adalah menggunakan model regresi linier sederhana, regresi linier adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel atau beberapa variabel dengan satu variable lain¹⁰³, sedangkan regresi linier sederhana ialah membandingkan antara satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, mengolah data menggunakan program SPSS Persamaan Regresi dinyatakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1$$

Dimana :

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta/koeffisien

¹⁰²*Ibid.* hlm. 30

¹⁰³Rohmad, Suprayitno, *Pengantar Statistik*, (Kalimedia Yogyakarta:2015) h. 183

b = Koefisien Regresi

X1 = Kontribusi BUMD

4. Uji Hipotesis

Uji statistik T atau uji parsial merupakan metode pengujian koefisien regresi untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, dimana yang menjadi variabel independen merupakan Kontribusi BUMD dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi variabel dependennya. Seperti halnya dengan uji hipotesis, pengambilan keputusan uji hipotesis secara parsial juga didasarkan pada nilai probabilitas yang didapatkan dari hasil pengelolaan data melalui program SPSS Statistik Parametrik sebagai berikut¹⁰⁴:

- 1). Jika probabilitas $>0,05$ maka H_0 diterima
- 2). Jika probabilitas $<0,05$ maka H_0 ditolak

5. Koefisien Determinasi

Pada model linier berganda ini akan dilihat besarnya kontribusi untuk variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya dengan melihat besarnya koefisien determinasi totalnya (R^2). Jika determinasi totalnya (R^2) yang diperoleh mendekati 1 (satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika determinasi totalnya (R^2)

¹⁰⁴Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Edisi Revisi ke 2, (Raja Grafindo Persada, Bandung:2006)

makin mendekati 0 (nol) maka semakin lemah pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat.¹⁰⁵

¹⁰⁵ Sudjana, *Metode Statistik*, (Bandung : PT. Tarsito, 2009), h.373

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung. Oleh karena itu, selain merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan, kota ini juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata.

Ibukota Bandar Lampung berada di Teluk Betung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' Lintang Selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' Bujur Timur. Ibukota provinsi Lampung ini berada di Teluk Lampung yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 197,22 Km² yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan. Secara administratif Kota Bandar Lampung dibatasi oleh:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Lampung.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Sebelum tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung merupakan keresidenan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964, yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 14 Tahun 1964, keresidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung dengan Ibu Kota Tanjung Karang- Teluk Betung. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1983. Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang-Teluk Betung diganti namanya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung terhitung sejak tanggal 17 Juni 1983, dan sejak tahun 1999 berubah nam menjadi Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Undnag-Undang No. 5 Tahun 1975 dan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1982 tentang perubahan wilayah maka Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 4 Kecamatan 30 Kelurahan menjadi 9 Kecamatan dengan 58 Kelurahan. Kemudian berdasarkan surat keputusan Gubernur/KDH Tingkat I Lampung Nomor G/185.B.111/Hk/1988 tanggal 6 Juli 1988 serta Surat Persetujuan MENDAGRI Nomor 140/1799/PUOD tanggal 19 Mei 1987 tentang pemekaran kelurahan di wilayah Kota Bandar Lampung, maka Kota Bandar Lampung dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dan 84 Kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04

Tahun 2001 tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka Kota Bandar Lampung menjadi 13 Kecamatan dengan 98 Kelurahan.

Pada tahun 2012, melalui Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012 tentang penataan dan pembentukan kelurahan dan kecamatan, yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, kembali dilakukan pemekaran kecamatan yang semula berjumlah 13 Kecamatan menjadi 20 Kecamatan dan pemekaran Kelurahan yang semula berjumlah 98 Kelurahan menjadi 126 Kelurahan.

Sejak tahun 1965 sampai saat ini Kota Bandar Lampung telah dijabat oleh beberapa Walikota/KDH Tingkat II berturut-turut sebagai berikut :

Tabel 4.1
Daftar Walikota Bandar Lampung Beserta Periode Jabatan

No	Nama Walikota/KDH Tingkat II	Periode Jabatan
1.	Sumarsono	Periode 1956 – 1957
2.	H. Zainal Abiding P.A	Periode 1957 – 1963
3.	Alimudin Umar, SH	Periode 1963 – 1969
4.	Drs. H.M. Thabrani Daud	Periode 1969 – 1976
5.	Drs. H. Fauzi Saleh	Periode 1976 – 1981
6.	Drs. H. Zulkarnain Subbing	Periode 1981 - 1986
7.	Drs. H.A Nurdin Muhayat	Periode 1986 – 1995
8.	Drs. H. Suharto	Periode 1996 – 2006
9.	Edy Sutrisno, S.Pd, M.Pd.	Periode 2006- 2010
10.	Drs. H. Herman HN, MM	Periode 2010 s.d. sekarang

Sumber : Bandar Lampung Dalam Angka 2016

3. Gambaran Umum BUMD Kota Bandar Lampung

a. PDAM Way Rilau

1) Sejarah PDAM Way Rilau

Sistem penyediaan sarana dan prasarana air bersih di Kota Bandar Lampung dikelola sejak zaman Pemerintahan Belanda, yaitu tahun 1917 dengan mengusahakan/memanfaatkan Sumber Mata Air “Way Rilau” yang berkapasitas produksi 18 liter/detik, yang bertujuan untuk melayani kebutuhan air bersih bagi masyarakat Tanjung Karang dan sekitarnya. Pada tanggal 11 Maret 1976 dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 02 tahun 1976 yang mengatur Tentang Pendirian Perusahaan Air Minum, dengan nama PDAM “WAY RILAU” Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung dan merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah Kotamadya Tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung.

Dengan adanya perubahan nama Kotamadya Daerah tingkat II Tanjung Karang – Teluk Betung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor: 24 Tahun 1983, maka nama Perusahaan Daerah Air Minum “Way Rilau” berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum “WAY RILAU” Kota Bandar Lampung. PDAM “WAY RILAU” Kota Bandar Lampung yang menjadi salah satu Perusahaan Milik Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan, mengelola prasarana dan sarana di bidang penyediaan air bersih dengan tujuan memberikan pelayanan air bersih secara adil dan terus menerus,

disamping mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi social dan profit dengan penerapan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

2) Tarif

Tarif untuk pelanggan PDAM Way Rilau sendiri dapat dilihat pada tabel berikut:

Gambar 4.1
Tarif Pelanggan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung

KELOMPOK PELANGGAN	KODE	
	0-10m3	>10m3
A. Kelompok Pelanggan I		
- Sosial Umum	1,300	3,380
- Sosial Khusus	1,300	3,380
- Rumah Sangat Sederhana	2,800	3,380
B. Kelompok Pelanggan II		
- Rumah Sederhana	3,380	4,710
- Rumah Tangga Menengah	3,380	4,840
- Kantor Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI ditingkat Kecamatan dan Kelurahan, ditingkat I/Pusat dan Kabupaten Kota	3,380	4,960
- Niaga Kecil	3,380	5,080
- Niaga Khusus	3,380	5,200
- Industri Rumah Tangga	3,380	5,320
C. Kelompok Pelanggan III		
- Rumah mewah dan Zona Air		
- Minum	4,840	6,290
- Niaga Besar	4,840	7,130
- Industri I	4,840	7,260
D. Kelompok Khusus		
- Pelabuhan Laut	20,000	20,000

Sumber: PDAM Way Rilau

Tarif pelanggan PDAM Way Rilau dibedakan menurut kelompok pelanggan yang terbagi dalam 4 kelompok yaitu kelompok pelanggan I, kelompok pelanggan II, Kelompok Pelanggan III, dan kelompok khusus. Setiap pelanggan sendiri membayar kepada PDAM atas air yang digunakan dengan bayaran per meter kubik dimana yang tertinggi adalah kelompok khusus yaitu pelabuhan laut sebesar Rp. 20.000 per meter kubik.

Gambar 4.2
Kondisi Pelayanan PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung
Tahun 2012-2015

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN			
			2012	2013	2014	2015 *
1	Jumlah Penduduk Administratif	Jiwa	913.562	935.302	957.043	978.783
2	Cakupan Pelayanan	%	25	25	24	26
3	Jumlah Sambungan	SR	34.216	35.071	35.413	38.658
4	Konsumsi Air	m3/Samb/bln	18	16	17	16
5	Jumlah Air Produksi	M ³	14.549.966	14.857.262	20.284.894	17.358.208
6	Jumlah Air Yang Didistribusikan	M ³	13.117.986	14.599.688	17.054.525	16.080.641
7	Kapasitas Terpasang	Lt/dt	712	730	755	674*
8	Kapasitas Produksi Riil	Lt/dt	602	620	643	604*
9	Idle Capacity	Lt/dt	140	149	0	0

Sumber : PDAM Way Rilau

Tabel diatas memperlihatkan jika pelayanan PDAM Way Rilau dari tahun 2012-2015 meningkat dari tahun ke tahun. Dalam pelayanannya terbagi menjadi 9 uraian yaitu jumlah penduduk administratif, cakupan pelayanan, jumlah sambungan, konsumsi air, jumlah air produksi, jumlah air yang didistribusiakan, kapasitas terpasang, kapasitas produksi riil, dan yang terakhir adalah idle capacity.

b. PD BPRS Bandar Lampung

BPRS Bandar Lampung didirikan melalui proses akuisisi oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap BPRS Sakai Sambayan yaitu Bank Syariah pertama di Propinsi Lampung yang beroperasi sejak tahun 1996 yang didirikan atas prakarsa Bapak Poedjono Pranyoto Gubernur Lampung saat itu, bersama para pejabat teras di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, ICMI Orwil Lampung dan MUI Propinsi Lampung

dengan Modal Dasar saat itu sebesar Rp. 500 juta yang beralamat di Kecamatan Natar – Lampung Selatan.

Sejak berdiri pada tahun 1996 perkembangan usahanya mengalami pasang surut dan pada tahun 2006 bank tersebut mulai mengalami masalah hingga penurunan kinerja yang dikarenakan banyaknya pembiayaan bermasalah (NPF) dan manajemen pengelolaan bank yang kurang profesional. Sejak itulah bank mengalami masalah yang cukup besar yaitu mulai dari kekurangan kecukupan modal (CAR) dan kesulitan likuiditas yang berakibat bank ini menjadi Bank Dalam Pengawasan Khusus (DPK) oleh Bank Indonesia.

Pada tahun 2006 Pemerintah Kota Bandar Lampung mempunyai rencana untuk mendirikan BPR Syariah (Bank Syariah) dengan membentuk Tim Pendirian Bank Syariah yang bekerjasama dengan Konsultan dari Fakultas Ekonomi Unila dalam melakukan kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah Kota Bandar Lampung. Dari hasil kajian tsb dinyatakan bahwa Pemda Kota Bandar Lampung sudah layak untuk mendirikan BPR Syariah. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan keuntungan Bank, pertumbuhan pembiayaan, dan pertumbuhan Aset dalam dua tahun terakhir

Tabel 4.2
Pertumbuhan Laba Bank, pembiayaan, dan aset BPRS Kota Banda Lampung
Tahun 2016-2017

Jenis	Tahun 2016	Tahun 2017
Laba Bersih	980.000.000	1300.000.000
Pertumbuhan Pembiayaan	20%	17,6%
Pertumbuhan Aset	9,93 %	15%

Sumber: BPRS Bandar Lampung 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya pertumbuhan Laba bersih dari tahun 2016 sebesar Rp. 980.000.000 yang naik menjadi Rp. 1300.000.000 yang artinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 320.000.000 selama satu tahun terakhir. Kemudian dalam pertumbuhan pembiayaannya sendiri sebesar 20% di tahun 2016 namun turun menjadi 17,6% pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017. Untuk pertumbuhan assetnya sendiri secara total mengalami pertumbuhan sebesar 9,93% pada tahun 2016 dan mengalami kenaikan pesat sebesar 15 % di tahun ini. Dengan demikian terlihat jelas jika pertumbuhan laba selama dua tahun terakhir cukup memuaskan ditambah dengan pertumbuhan asset yang cukup besar sehingga kedepannya diharapkan angka ini akan naik terus walaupun pertumbuhan pembiayaannya masih menurun namun hal ini belum angka final karena data tersebut belum secara keseluruhan satu tahun 2017.

Adapun hasil kajian tentang kelayakan pendirian Bank Syariah Bandar Lampung sebagai berikut :

- 1) Setelah melalui beberapa tahapan proses tentang pendirian Bank Syariah maka selanjutnya rencana pendirian Bank Syariah tsb direalisasikan dengan cara akuisisi, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 tentang Pembentukan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Bandar Lampung dan dilanjutkan dengan terbitnya Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 91 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bandar Lampung pada PT BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.2.957.000.000,-.
- 2) Pelaksanaan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung di BPRS Sakai Sambayan dilakukan melalui RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Bambang Abiyono, SH. No. 20 tanggal 5 Desember 2008 tentang Akuisisi dan Akta Notaris Bambang Abiyono, SH Nomor 21 tanggal 5 Desember 2008 tentang Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa BPRS Sakai Sambayan yang telah mendapat pengesahan Menkum dan Ham RI pada tanggal 04 Nopember 2009. Maka dengan penyertaan modal Pemda Kota Bandar Lampung sebesar Rp. 2.957.000.000,- dari total modal setor seluruh pemegang saham BPRS Sakai Sambayan sebesar Rp.

5.000.000.000,- setelah akuisisi dihasilkan nilai saham milik Pemda Kota Bandar Lampung menjadi sebesar Rp. 3.978.500.000,- atau 79,57%.

Pada Keputusan RUPS Luar Biasa tersebut diatas juga disetujui untuk menambah Modal Dasar Perseroan dari Rp. 5 Milyar menjadi Rp. 10 Milyar, mengganti nama BPRS Sakai Sambayan menjadi BPRS Bandar Lampung, melakukan Relokasi kantor dari Kecamatan Natar Lampung Selatan ke wilayah Bandar Lampung., dan melakukan Reorganisasi Pengurus Perseroan.

Sejak proses akuisisi tersebut dilaksanakan, maka secara operasional Bank Syariah Bandar Lampung diresmikan pada tanggal 22 Desember 2008 oleh Bank Indonesia yang beralamat di Jl. Pangeran Antasari No. 148 Bandar Lampung, sehingga pada tanggal 22 Desember 2008 ditetapkan sebagai hari berdirinya Bank Syariah Bandar Lampung.

Keberadaan Bank Syariah Bandar Lampung memiliki prospek yang cukup menjanjikan dikarenakan di Bandar Lampung satu-satunya BPR yang beroperasi dengan prinsip syariah adalah BPRS Bandar Lampung. Manfaat yang diperoleh saat ini adalah pelayanan kepada masyarakat, mengingat animo masyarakat terhadap perbankan syariah cukup tinggi dan karena penduduk di Kota Bandar Lampung mayoritas muslim, sehingga menjadi pasar yang potensial untuk mengembangkan semua kegiatan yang berbasis syariah, terutama BPRS.

Bagi masyarakat yang ingin meninggalkan sistem riba dan beralih ke sistem syariah, BPRS dapat menjadi pilihan, karena dikelola dengan menganut prinsip keterbukaan dan keadilan.

c. PD BPR Bank Pasar

PD. BPR BANK PASAR Kota Bandar Lampung merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah dibidang Keuangan Perbankan dan menjalankan usahanya sebagai BPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdirinya PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung bertujuan memberi pelayanan yang wajar kepada para pedagang nasional yang bermodal kecil serta menghindarkan mereka dari rongrongan para pengijon yang senantiasa menjalankan operasi di daerah pasar disatu pihak, dilain pihak untuk turut menciptakan stabilisasi perekonomian di Kota Bandar Lampung khususnya serta Daerah Lampung pada umumnya.

Berdasarkan Keputusan DPRD-GR Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung tanggal 24 Juni 1969 Nomor : 13/DPRD-GR/1969 tentang persetujuan pendirian “*Kantor Administrasi Simpan Pinjam Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung*” merupakan cikal bakal terbentuknya PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Pada waktu Walikota Bandar Lampung dijabat oleh Drs. Hi Thabrani Daud, dikeluarkanlah Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tanjung Karang-Teluk Betung tanggal 30 Juli 1970 Nomor : 44/1970 tentang Pendirian Bank Pasar Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung.

Adapun pelaksanaan Surat Keputusan tersebut di atas pada tanggal 01 Agustus 1970 merupakan awal kegiatan/Operasioanal Bank Pasar dipimpin oleh Drs. Hamdan Amid dengan modal awal sebesar Rp. 300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan sampai dengan akhir bulan Desember 1970 berjumlah sebesar Rp. 1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah). Sehingga pada tanggal 30 Juli 1970 ditetapkan sebagai hari berdirinya PD. BPR Bank Pasar Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan Surat Bank Indonesia Cabang Teluk Betung tanggal 3 Agustus 1971 No. 4/7/UPPB/PPTR atas ketetapan Bank Indonesia Pusat bahwa Struktur organisasi Bank Pasar harus dipisahkan dari Pemerintah Daerah Kotamadya Tanjung Karang-Teluk Betung, agar Bank dapat bertindak sesuai dengan kebijaksanaannya yang telah digariskan oleh Peraturan Bank dan petunjuk–petunjuk dari Bank Sentral.

Kemudian, dalam realisasinya terhadap PAD, PD BPR Bank Pasar dari 5 tahun terakhir yaitu 2011-2015 sebagai berikut:

Tahun	Realisasi PD BPR
2011	4.000.000.000
2012	5.000.000.000
2013	5.500.000.000
2014	9.221.589.469
2015	5.207.360.514

Melihat tabel diatas bahwa dari tahun ke tahun terus meningkat kecuali pada tahun 2015 yang menurun dikarenakan penurunan nilai kredit pada tahun tersebut. Namun pada tahun berikutnya pemerintah kota Bandar Lampung membuat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 tahun 2015 tentang penambahan modal disetor pada perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank pasar kota Bandar Lampung dimana modal yang semula Rp. 20.000.000.000 menjadi Rp 75.000.000.000 agar dapat meningkatkan pendapatan sehingga membantu PAD Kota Bandar Lampung lebih maksimal lagi dimana sesuai dengan peraturan daerah ditetapkan bahwa bagi hasil untuk daerah sebesar 50%.

B. Hasil Analisis Data

Penulis menggunakan uji Asumsi Klasik yaitu uji Normalitas, uji, Analisis Regresi Sederhana, uji T dan analisis kontribusi untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti. Jawaban dihitung berdasarkan hasil data yang telah diolah dimana terdiri dari data laporan realisasi laba BUMD kota Bandar Lampung dan data laporan realisasi PAD kota Bandar Lampung tahun 2006-2015.

1. Uji Analisis Kontribusi

Analisis Kontribusi BUMD digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan laba BUMD dalam mendukung pendapatan daerah. Analisis ini dihitung dengan cara menandingkan antara realisasi penerimaan dari laba BUMD dengan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan analisis ini akan didapatkan seberapa besar

kontribusi hasil laba BUMD terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ke tahun selama tahun 2010-2015, didapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun. Dengan begitu di dapatkan hasil dari kontribusi laba BUMD terhadap PAD Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

Tabel 4.3
Kontribusi Laba BUMD Terhadap PAD Kota Bandar Lampung
Tahun 2006-2015

Tahun	Laba BUMD	PAD	Kontribusi	Kriteria
2006	2.031.614.129	46.137.259.170	4,40%	Sangat Kurang
2007	2.149.975.288	53.714.914.762	4,00%	Sangat Kurang
2008	2.509.144.000	67.661.519.022	3,71%	Sangat Kurang
2009	3.087.055.409	70.432.264.168	4,38%	Sangat Kurang
2010	3.449.399.341	86.692.399.700	3,97%	Sangat Kurang
2011	5.631.089.632	162.772.590.332	3,46%	Sangat Kurang
2012	6.862.738.923	290.008.025.238	2,36%	Sangat Kurang
2013	8.237.246.269	359.628.303.288	2,29%	Sangat Kurang
2014	13.206.503.301	387.175.943.392	3,41%	Sangat Kurang
2015	11.249.697.683	394.899.945.876	2,85%	Sangat Kurang

Sumber : Data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015

Dari tabel 4.4 diatas terlihat bahwa pada tahun 2006 Laba BUMD memberikan kontribusi 4,40% dari total PAD sebesar Rp 46.137.259.170 yang artinya memberikan kontribusi yang sangat kurang

kepada PAD Kota Bandar Lampung, tahun 2007 Laba BUMD memberikan kontribusi yang menurun yaitu 4,00 % dari total PAD sebesar Rp 53.714.914.762 dimana artinya memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD Kota Bandar Lampung, tahun 2008 Laba BUMD kembali memberikan kontribusi 3,71% atau menurun dari tahun sebelumnya dari total PAD sebesar Rp 67.661.519.022 dimana artinya memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD Kota Bandar Lampung, tahun 2009 Laba BUMD memberikan kontribusi 4,38% atau mengalami perbaikan atas penurunan di tahun sebelumnya dari total PAD sebesar Rp 70.432.264.168 tetapi kontribusi Laba BUMD terhadap PAD masih dikatakan sangat kurang, tahun 2010 Laba BUMD memberikan kontribusi 3,97% atau mengalami penurunan dari total PAD sebesar Rp 86.692.399.700 atau dapat dikatakan laba BUMD memberikan kontribusi sangat kurang terhadap PAD, tahun 2011 Laba BUMD memberikan kontribusi 3,46% atau mengalami penurunan dari total PAD sebesar Rp 162.772.590.332 yang artinya laba BUMD memberikan kontribusi yang sangat kurang kembali terhadap PAD, tahun 2012 Laba BUMD memberikan kontribusi yang menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,36% dari total PAD sebesar Rp 290.008.025.238 atau artinya dapat dikatakan kembali memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD Kota Bandar Lampung, tahun 2013 Laba BUMD memberikan kontribusi yang menurun lagi yaitu kontribusinya sebesar 2,29% dari total PAD sebesar Rp 359.628.303.288 yang artinya

memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD Kota Bandar Lampung, tahun 2014 Laba BUMD memberikan kontribusi 3,41% atau mengalami peningkatan dari total PAD sebesar Rp 387.175.943.392 tetapi masih memberikan kontribusi yang sangat kurang terhadap PAD, dan tahun 2015 Laba BUMD memberikan kontribusi 2,83% atau menurun dibandingkan tahun sebelumnya dari total PAD sebesar Rp 394.899.945.876 yang artinya kontribusi Laba BUMD terhadap PAD sangat kurang.

Berdasarkan data diatas secara umum, realisasi penerimaan Laba BUMD mengalami peningkatan setiap tahunnya namun kontribusi Laba BUMD mengalami kenaikan maupun penurunan atau bersifat fluktuatif selama 10 tahun terakhir. Hal ini disebabkan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh Laba BUMD tetapi dipengaruhi oleh hasil penerimaan PAD lainnya seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah lainnya. Dari hasil kontribusi laba BUMD ini menggambarkan bahwa sumber penerimaan dari Laba BUMD memberikan kontribusi yang dapat dikategorikan sangat kurang sebab jika dihitung secara rata-rata memberikan kontribusi di bawah 10%. dilihat dari nilai terendah (seperlima dari PAD). Sehingga dapat dikatakan bahwa kontribusi Laba BUMD di kota Bandar Lampung masih dikatakan sangat kurang untuk menyumbang terhadap penerimaan PAD di kota Bandar Lampung selama kurun waktu 2006-2015 .

2. Uji Normalitas

Uji normalitas akan menguji data variabel bebas dan data variabel terikat pada persamaan regresi yang dihasilkan berdistribusi normal atau berdistribusi tidak normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan variabel terikat berdistribusi normal atau normal sama sekali. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* satu arah dengan hipotesis sebagai berikut.

H₀: variabel tidak berdistribusi normal

H_a: variabel berdistribusi normal

Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan melihat nilai signifikansinya. Jika signifikansinya $> 0,05$ maka H_a diterima dan H₀ ditolak yang artinya variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikansi $< 0,05$ maka H_a ditolak dan H₀ diterima yang artinya variabel tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.4
Hasil Uji *Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.45130241
Most Extreme Differences	Absolute	.173
	Positive	.173
	Negative	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		.548
Asymp. Sig. (2-tailed)		.924
a. Test distribution is Normal.		

Sumber : SPSS 21 Data diolah Tahun 2017

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4.2 diatas dengan menggunakan metode *one sampel kolmogorov-smirnov* menunjukkan bahwa nilai residual dari variabel dependen dan variabel indeviden pada jumlah sampel (N) sebesar 10 adalah 0,924. Dengan demikian, data dari penelitian ini terdistribusi secara normal karena nilai residualnya lebih besar dari signifikansi 0,05 atau $0,924 > 0,05$ sehingga model regresi dapat digunakan untuk pengujian hipotesis.

3. Alat Uji Hipotesis

a. Regresi Linier Sederhana

Dengan regresi sederhana dapat diketahui terdapat tidaknya pengaruh antara Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah. Regresi sederhana digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Tabel 4.5
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	29.115	.740		39.326
	Kontribusi BUMD	-.991	.208	-.860	-4.765
					.001

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : SPSS 21 Data Diolah Tahun 2017

Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.3 di atas. Persamaan regresi yang didapatkan dari hasil perhitungan adalah sebagai berikut :

$$Y = 29.115 - 0.991X + e$$

Dimana :

Y = Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X = Variabel Kontribusi BUMD

Koefisien – koefisien persamaan regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 29.115, menyatakan bahwa jika variabel independen nilainya 0, maka keputusan faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar 219.115.
- 2) Berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan uji regresi linier sederhana koefisien regresi pada variabel independen yaitu Kontribusi BUMD bertanda negative sebesar -0.991 , artinya menunjukkan setiap kenaikan 1% dari kontribusi BUMD maka Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar -0.991% . Hasil penelitian koefisien regresi bernilai negative berarti terjadi hubungan yang negative antara kontribusi BUMD dan Pendapatan Asli Daerah. Jika semakin besar kontribusi BUMD di Kota Bandar Lampung maka semakin menurun pula Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Begitupun Sebaliknya.

b. Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji T)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi pada variabel independen yaitu kontribusi BUMD berpengaruh negative terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil dalam pengujian ini dapat dilihat pada tabel 4.3 di atas. Sebelum menyimpulkan hipotesis yang diterima atau ditolak, terlebih dahulu menentukan t_{tabel} dengan signifikan $5\%:2 = 2,5\%$

(uji 2 sisi) dan derajat kebebasan $df = n - k - 1$ atau $10 - 1 - 1$ diperoleh hasil t_{tabel} sebesar 2.306.

Dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel Kontribusi BUMD menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar -4.765 artinya t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-4,765 < 2,306$) tetapi nilai Signifikan yang lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Sehingga dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kontribusi BUMD secara statistik dengan $\alpha : 5\%$, dapat dikatakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Bandar Lampung. Sehingga semakin besar kontribusi BUMD di kota Bandar Lampung maka semakin menurun pula Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh begitupun sebaliknya.

4. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Berikut hasil uji koefisien determinasi :

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860 ^a	.739	.707	.47868

a. Predictors: (Constant), Kontribusi BUMD

Sumber : SPSS 21 Data Diolah Tahun 2017

Berdasarkan hasil pengamatan dari Tabel 4.4 di atas, diketahui koefisien determinasi (R^2) adalah 0,739. Hal ini menunjukkan besarnya kemampuan variabel bebas (independen) dalam penelitian untuk menerangkan variabel terikat (dependen) adalah sebesar 73,9%. Sehingga dapat diartikan bahwa variabel Kontribusi BUMD mempengaruhi terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 73,9% sementara sisanya yakni 26,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimaksud dalam penelitian ini.

5. Pengaruh Kontribusi BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2006-2015.

BUMD adalah perusahaan yang diatur dengan suatu peraturan daerah yang aktivitasnya memenuhi kebutuhan masyarakat di mana modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ada ketentuan lain. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai

manfaat yang sangat besar bagi perekonomian bagi masyarakat di daerah, dimana tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah.

Pengelolaan atas kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi sangat penting ketika pemerintah daerah berusaha meningkatkan pendapatannya untuk membiayai pelayanan publik yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan begitu membuktikan bahwa perusahaan BUMD ini dibentuk untuk membantu meningkatkan penerimaan daerah di Kota Bandar Lampung yang di gunakan untuk pembangunan daerah dan kepentingan publik. BUMD memiliki kedudukan sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi. Oleh karena itu, BUMD perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai perekonomian daerah. Laba dari BUMD diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Di Kota Bandar Lampung, hasil kontribusi BUMD pada tahun 2006-2015 di Kota Bandar Lampung, dimana hasil Kontribusi BUMD terhadap PAD selama sepuluh tahun belakangan bersifat fluktuatif. Meskipun bersifat fluktuatif, BUMD memberikan kontribusi dibawah 10%, sehingga dengan begitu kontribusi BUMD di Kota Bandar Lampung dikategorikan sangat kurang selama sepuluh tahun.

Pada penelitian ini variabel Kontribusi BUMD mempunyai nilai koefisien regresi sederhana bernilai negatif yaitu sebesar -0,991. artinya

menunjukkan setiap kenaikan 1% dari Kontribusi BUMD maka Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar -0,991%. Tetapi berdasarkan uji 2 sisi pada uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel Kontribusi BUMD menunjukkan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh dibawah 0,05 ($0,001 < 0,05$) dimana dapat dikatakan bahwa H_a diterima H_o ditolak sehingga variabel Kontribusi BUMD berpengaruh signifikan tetapi negatif sebab nilai t_{hitung} nya bernilai negatif yaitu -4,765 dan lebih kecil dari pada nilai t_{tabel} yaitu 2,306 ($-4,765 < 2,306$).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak dan H_o diterima yang berarti variabel Kontribusi BUMD dalam penelitian ini memiliki berpengaruh signifikan yang bersifat negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Bandar Lampung. Hampir serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Rizka Amalia (2011) dengan judul “Peranan BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta” dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Laba BUMD berpengaruh signifikan terhadap PAD di DIY 2001-2010.

Akan tetapi di kota Bandar Lampung Kontribusi BUMD memberikan pengaruh yang bersifat negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2006-2015. Maka hal ini mengasumsikan bahwa ini disebabkan hasil kontribusi BUMD pada tahun 2006-2015 di Kota Bandar Lampung, dimana hasil kontribusi BUMD terhadap PAD selama sepuluh tahun belakangan bersifat fluktuatif dan dibawah 10%. Laba BUMD tidak memberikan kontribusi yang cukup baik sehingga dengan begitu kontribusi BUMD di

Kota Bandar Lampung dikategorikan sangat kurang selama sepuluh tahun. Hal ini menggambarkan bahwa laba BUMD sangatlah minim dalam menyumbang kepada PAD di kota Bandar Lampung, hal ini terlihat dari tidak mencapai targetnya laba BUMD selama 10 tahun terakhir sehingga masih sangat kurang untuk memberikan kontribusi kepada PAD di kota Bandar Lampung dan juga dari ketiga perusahaan BUMD di Kota Bandar Lampung dalam pengelolaannya masih belum optimal seperti yang disebabkan adanya faktor internal perusahaan.

6. Kontribusi BUMD dalam Pandangan Ekonomi Islam di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh kontribusi BUMD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Bandar Lampung menunjukkan hasil yang negatif dimana artinya kontribusi BUMD memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah yang secara langsung tentu saja berdampak pula pada perekonomian daerah.

BUMD di kota Bandar Lampung memiliki pengaruh terhadap PAD, tetapi kontribusinya rata-rata selama 10 tahun di bawah 10%. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan yang kurang baik. Sebab hal ini tentu sulit untuk membantu pemerintah dalam penambahan akan pendapatan atas perusahaan milik daerah sendiri yang mana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan pembangunan di kota Bandar Lampung yang salah satunya untuk pengembangan sektor pelayanan publik yang berimbas pada perekonomian masyarakat meningkat.

Seperti dalam penelitian yang telah dilakukan juga menunjukkan jika pengelolaan BUMD kurang optimal hal ini terlihat dari hasil kontribusi yang diberikan sangat kurang selama 10 tahun terakhir di Kota Bandar Lampung. meskipun demikian laba BUMD memiliki pengaruh terhadap PAD.

Lebih dari itu, BUMD di kota Bandar Lampung yang terdiri dari tiga perusahaan diantaranya seperti PDAM Way Rilau, BPRS dan Bank Pasar. Tidak hanya sebagai alat pengumpul pendapatan daerah serta pengendalian ekonomi saja, perusahaan-perusahaan BUMD juga sebagai sumber pembiayaan di kota Bandar Lampung . Ketiga Badan ini di kelola oleh pemerintah Kota Bandar Lampung bukan hanya memiliki fungsi sosial tetapi memiliki fungsi profit dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan menghasilkan produk pelayanan yang biasanya tersebar dalam barang dan jasa sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk pembangunan Kota Bandar Lampung sendiri.

Seperti pada PDAM Way Rilau yang tidak hanya memiliki fungsi secara sosial tetapi memiliki fungsi secara profit. Fungsi secara sosial ini bahwa perusahaan dituntut harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memproduksi air minum dan air bersih di setiap kalangan masyarakat. Dengan begitu akan terciptanya keadilan yang merata dapat pemenuhan kebutuhan air bersih di kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan kebutuhan akan air minum dan air bersih merupakan kebutuhan mendasar atau pokok setiap masyarakat terutama dalam hal air bersih yang tentu saja berhubungan dengan kesehatan

masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung. Kemudian, dalam fungsi ekonomi sendiri yaitu bahwa PDAM Way Rilau kota Bandar Lampung sebagai BUMD yang senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuan pelayanan dan lainnya dengan cara pengelolaan PDAM secara sehat berdasarkan azaz ekonomi perusahaan.

Dalam praktiknya, Islam telah memberikan petunjuk lewat sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya manusia itu berserikat atas tiga hal, yaitu api, air dan padang rumput. Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 13 sebagai berikut :

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir” (Al-Jaatsiyah : 13)

Salah satu lembaga di bawah kendali langsung Nabi SAW, adalah *Baitumal*. Satu-satunya lembaga yang mempunyai sejarah panjang peradaban ekonomi Islam. Rasulullah dan para sahabat menjadikan pusat pengendalian ekonomi tersebut sebagai alat control dan alat pengumpul zakat serta pajak Negara. Hal ini sejalan dengan pengelolaan BUMD di kota Bandar Lampung dimana perusahaan-perusahaan tersebut berada dibawah kendali langsung

pemimpin daerah (Walikota Bandar Lampung) sebagai salah satu alat pengumpul pendapatan daerah.

Sejauh ini PDAM Way Rilau telah melaksanakan pengelolaannya sesuai dengan azas ekonomi yang telah mereka tetapkan sendiri dan berjalan dengan baik untuk kemaslahatan umat sehingga pengelolaan tersebut secara langsung berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuannya. Tetapi meskipun demikian laba BUMD masih belum dapat mencapai target yang telah di tetapkan. Karena adanya faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan yang dapat mempengaruhi pengelolaan perusahaan, sehingga Dengan begitu PDAM Way Rilau akan sulit untuk membantu menyumbangkan dari keuntungan yang didepatkan kepada PAD kota Bandar Lampung

Dalam pandangan ekonomi Islam sendiri, hal ini belum dapat dikatakan sesuai dengan prinsip Islam sebab, kontribusi yang diberikan masihlah sangat kurang karena pemerintah memiliki kewajiban atau tanggung jawab untuk mensejahterakan masyarakat seperti dalam penyediaan air minum dan air bersih secara adil dan merata yang mana di kota Bandar Lampung sendiri sudah terpenuhi oleh PDAM Way Rilau terlebih badan usaha ini membantu pemerintah juga dalam melaksanakan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Tetapi dengan pengelolaan yang masih kurang baik hal ini menyebabkan berkurangnya kontribusi dari laba keuntungan yang didapatkan perusahaan kepada pemerintah. Ini artinya, akan pengelolaan perusahaan untuk mendapatkan laba masih dikatakan belum memenuhi prinsip ekonomi Islam

yang salah satunya membahas mengenai kesejahteraan dan keadilan sebab apabila pengelolaan perusahaan kurang baik hal ini menyebabkan turunnya kontribusi yang diberikan kepada pemerintah sehingga sulit bagi pemerintah untuk membiayai pembangunan di kota Bandar Lampung.

Selanjutnya PD BPRS yaitu lembaga keuangan pertama yang didirikan secara operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Lembaga keuangan ini didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dalam pendanaan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang mana Islam sendiri telah memandang lembaga keuangan sebagai salah satu lembaga yang dapat membantu perekonomian masyarakat yang pada akhirnya mengubah perekonomian suatu wilayah menjadi lebih baik. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa Allah telah memerintahkan umatnya untuk melakukan peniagaan secara sukarela.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa :29)

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah telah memerintahkan umatnya untuk melakukan perniagaan secara sukarela dan suka sama suka dan Allah melarang untuk memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Hal ini mengidentifikasi bahwa dengan adanya BPRS ini untuk membantu masyarakat kota Bandar Lampung untuk melakukan transaksi perniagaan dimana sesuai dengan syariat Islam dan terjauh dari Riba.

Dalam pandangan ekonomi Islam sendiri hal ini sudahlah baik sebab dengan adanya BPRS yang digunakan pemerintah untuk membantu masyarakat dalam masalah pembiayaan dengan sistem yang sesuai prinsip ekonomi Islam dimana didalamnya terdapat sistem pembiayaan *mudharabah*, *murabahah*, dan lain sebagainya bukan menggunakan sistem bunga sehingga tidak memberatkan masyarakat yang meminjam dana untuk pembiayaan. Selain itu juga, PD BPRS memberikan keuntungan kepada pemerintah dan pastinya sudah berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Namun dikarenakan PD BPRS di Kota Bandar Lampung belum terlalu lama berdiri sehingga dalam pengelolaan pun masih belum optimal sehingga menyebabkan laba yang diperoleh sering kali tidak sesuai target yang telah ditentukan sehingga menyebabkan kontribusi laba BUMD masih sangat kurang terhadap PAD.

Terakhir yaitu PD BPR Bank Pasar dimana memiliki tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi secara aktif, dengan bergerak dibidang pemberian kredit bagi masyarakat kota Bandar Lampung dan secara tidak langsung, sebagai stimulator bagi lancarnya kegiatan perekonomian masyarakat Kota Bandar Lampung. BPR Pasar diharapkan mampu membantu

dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

Pemberian kredit kepada masyarakat ini membantu meringankan kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung untuk keperluan modal guna meningkatkan usaha masyarakat. Dalam pandangan Ekonomi Islam sendiri hal ini cukup baik dimana pemerintah sebagai pemimpin bertanggung jawab memberikan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar sejahtera, tetapi bila dikaji lebih spesifik pada proses transaksi di BPR ini adanya bunga yang cukup besar sehingga memicu adanya unsur riba yang dimana dalam pandangan Islam hal tersebut sangat dilarang dalam agama Islam seperti pada surat Al-Baqarah : 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Al-Baqarah :275)

Dari penjelasan ayat diatas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sehingga apabila transaksi tersebut masih mengandung adanya riba maka transaksi tersebut sangatlah tidak baik. Seperti halnya riba, memberikan bunga kredit yang begitu besar akan merugikan nasabah dan akan menimbulkan kebatilan di tengah masyarakat. Sehingga apabila kita ingin memberikan kredit seharusnya tidak diberlakukannya bunga.

Pemerintah pula harus dapat mengawasi BUMD agar tidak menjadi pemain utama dalam prekonomian dan menguasai pasar secara monopolistik sehingga merugikan pihak-pihak swasta lainnya. Di Kota Bandar Lampung yang memiliki 3 Badan Usaha Milik Daerah diantaranya seperti PDAM Way Rilau, BPRS dan Bank Pasar. Sebab, di zaman ini BUMN/BUMD tidak hanya berperan dalam pengendalian ekonomi atau sosial semata, tetapi lebih jauh adalah juga sebagai sumber pembiayaan Negara dengan menghasilkan produk pelayanan yang biasanya tersebar dalam barang dan jasa.

Dalam hal ini artinya keberadaan BUMD sangatlah penting sebab apabila BUMD dioptimalkan secara maksimal dan baik maka keuntungan dari BUMD sendiri akan memberikan kontribusi yang besar kepada penerimaaaaan Negara ataupun daerah yang dimana hal itu dapat membantu pemerintah untuk menjalankan pembangunan agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi sehingga dengan begitu kesejahteraan masyarakat pun ikut meningkat.

Kemudian, dalam Islam sendiri, sudah dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat sangatlah penting dan itu menjadi tugas pemerintah sebagai ulil amri di negaranya.

Menurut Abu Ubaid (155-224 H) andil Negara begitu besar dalam perekonomian, karena tugas Negara adalah menegakkan kehidupan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan yang disyariatkan, seperti penerapan zakat dapat mengikis kesenjangan sosial dan menumbuhkan kepedulian sosial. Melalui pengaturan administrasi keuangan Negara selektif, sehingga penyediaan kebutuhan pokok, fasilitas umum, distribusi pendapatan dapat menjamin kemaslahatan umat yang pada akhirnya terselenggara kegiatan perekonomian yang berkeadilan. Hal ini serupa dengan Q.S Al-Baqarah 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”

Dalam ayat diatas Allah SWT menegaskan tentang keuangan Negara yang digunakan dalam kepentingan sosial/kebajikan yang serupa dengan tujuan dari laba BUMD untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Penggunaan keuangan Negara (harta Negara) untuk kepentingan sosial sehingga Laba BUMD haruslah memberikan kontribusi yang baik sehingga dapat memberikan pendistribusian yang merata. Sebab dalam pendistribusian ini tercermin larangan dalam Al-Qur'an agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan hanya beredar pada orang-orang tertentu saja tetapi terdistribusi secara merata sehingga diharapkan dapat memberikan kesejahteraan secara menyeluruh terhadap masyarakat kota Bandar Lampung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian Pengaruh Kontribusi BUMD Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Persepektif Ekonomi Islam di Kota Bandar Lampung Tahun 2006 sampai 2015 adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil uji penelitian dengan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana, secara parsial dari hasil uji signifikan parametrik individual (uji t) pada variabel Kontribusi BUMD berpengaruh signifikan yang bersifat negatif terhadap Peningkatan Pendapatan dengan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$, tetapi dengan hasil $t_{hitung} -4,765$ sehingga dapat dikatakan H_a ditolak dan H_o diterima. Artinya variabel Kontribusi BUMD berpengaruh secara negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Bandar Lampung tahun 2006-2015.
2. Berdasarkan padangan Ekonomi Islam, bahwa Laba BUMD yang sebagai salah satu penerimaan daerah dapat memberikan keadilan dalam distribusi kekayaan/pendapatan untuk sektor publik seperti dijelaskan pada QS. Al-Baqaroh 261 dimana harus adanya keadilan dalam distribusi kekayaan oleh Negara/daerah. Hal ini juga tentu akan menimbulkan/memunculkan kesejahteraan yang merata bagi setiap lapisan masyarakat.

B. Saran

1. Bagi pemerintah daerah, khususnya BPKAD dan BPPRD dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan adanya sebuah upaya yang dilakukan dalam

meningkatkan penerimaan PAD melalui kebijakan dalam sumber-sumber penerimaan daerah baik secara *ekstensifikasi* dan *intensifikasi* agar meningkatnya penerimaan daerah yang telah di targetkan sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan demi terciptanya kesejahteraan masyarakat kota Bandar Lampung. Selain itu, dari klasifikasi kriteria atas kontribusi Laba BUMD terhadap PAD diharapkan pemerintah dapat mengelola BUMD agar kontribusinya dapat meningkat sehingga dapat dikreterikan kriteria sangat baik terhadap PAD Kota Bandar Lampung dimasa yang akan datang.

2. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebuah bahan referensi untuk kegiatan mengajarnya ataupun penelitiannya. Dikarenakan penelitian ini masih memiliki kekurangan seperti keterbatasan dalam memperoleh data dan periode waktu yang digunakan hanya 10 tahun. Sehingga penelitian selanjutnya diharapkan mampu meneliti dengan menambah variabel bebas lainnya dan tahun penelitian sehingga mampu memberikan hasil penelitian yang lebih baik lagi.
3. Bagi Publik, dengan hasil penelitian ini diharapkan masyarakat juga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi daerah, karena hal tersebut akan memberikan *Feedback* kepada masyarakat hasil pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2012).
- Abdullah, Dri Asmawanti, dan Febriansyah, “ Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Konerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan” *Jurnal Akuntansi FEB Universitas Bengkulu*, Vol3, No.1 , (2015), h.42, <http://jafebunib.ac.id>
- Ayu Mutia Sari, ‘*Analisis Kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Dalam Memberikan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2001-2006*’, (Skripsi Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2007)
- Adi Suhendra Subandrio, *Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Utama Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah*, 2009.
- Baihaqi, “Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu”, *Jurnal Akuntansi* Vol. 1 No. 3 Tahun 2011.
- Bank Syariah Bandar Lampung, *Sejarah BPRS Kota Bandar Lampung*, diakses dari banksyariahbandarlampung.co.id pada 8 Juni 2017 pukul 05:43 WIB.
- Bayu Pratama Putra, “Analisis Kontribusi Laba Perusahaan Bumd Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjung Pinang Periode 2010-2015”, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritime Raja Ali Haji, Tanjung Pinang Kep.Riau, 2016.
- Berlian Jawa Kesuma, *Analisis Tingkat Efektivitas dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2008-2012*, (Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang, 2013)

Djainuri, Aries. *Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat Daerah*, (Bogor: Gailia Indonesia, 2012)

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2013),h.228

Drs. Darwin., MBP, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*,(Jakarta : Mitra Wacana Media, 2010), h. 119-128

Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam : Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2005)

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syari'ah*, (Jakarta : PT. Grafindo Pustaka, 2007), h.80

Huda, Nurul dkk, *Keuangan Publik Islam: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, (Jakarta : Kencana, 2012)

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Makro Islam Edisi ke-3*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2015),

Kementrian Pendidikan dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2015), h.147.

Konsideran Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Megafury Apriandhini dan Widyasari Laporan Penelitian Dosen Pemula :
Pengurusan Terhadap Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
(Tinjauan Yuridis Terhadap BUMD), (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2014).

Mardiasmo, *Perpajakan Edisis Revis Tahun 2011*, (Yogyakarta : CV ANDI OFFSET,2011), h.15

Mesti Wilhelmina Nisriana Manefa dan Frits Oscar Fanggidae, *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Strategis Akuntansi dan*

Pelaporan Pemerintahan Kabupaten Rotendao, (Indonesia: Jaringan Peneliti Kawasan Timur Indonesia, 2015).

Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Esisi Revisi ke 2, (Raja Grafindo Persada, Bandung:2006)

Purwadi, IR. *Penelitian tentang Strategi Pengembangan BUMD Non Perbankan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah* (Surabaya: Balitbang Daerah Provinsi Jawa Timur, 2002).

PDAM Way Rilau, www.pdamwayrilau.com, diakses tanggal 8 Juni 2017 pukul 05:03 WIB.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2012.

Putu Lia Perdana Sari, “Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 2, No.3 , (2013), h.716, ejournal.undiksha.ac.id

P3EI. *Ekonomi Islam*.(jakarta: Rajawali Pers. 2011)

Undang-undang No. 25 Tahun 2000tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Rohmad, Suprayitno, *Penghantar Statistik*, (Kalimedia Yogyakarta:2015)

Suyanto Danang, *Analisis Validitas & Asumsi Klasik*, Dwi (Pustaka, Jakarta : 2011)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik.*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, dan Penelitian Evaluasi*, Alfabeta, Bandung, 2015

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 2, www.djpk.depkeu.go.id

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Widi Angga KURNIAWAN, *'Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung)'*

Wawan Sukmana dan Irman Firmansyah, *Analisis Problematika Kinerja BUMD Non-Keuangan di Jawa Barat: Aplikasi Metode Analytic Network Process*, Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Siliwangi, tahun 2014

Wahyu Maizal, *Tinjauan Hukum Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2014)

Yudianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung : M2S, 2001).

Yunita Aprilia, "Analisis Pengaruh Desentralisasi Perpajakan Terhadap Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Ekonomi Islam (Studi pada kantor PEMDA kota Bandar Lampung)"(Skripsi Program Sarjana S1 Ekonomi Syariah IAIN RI Lampung, Bandar Lampung, 2016),h.7

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*,(Jakarta : Rajawali Pers, 2013)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Kontribusi BUMD ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.860 ^a	.739	.707	.47868

a. Predictors: (Constant), Kontribusi BUMD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	29.115	.740		39.326	.000
	Kontribusi BUMD	-.991	.208	-.860	-4.765	.001

a. Dependent Variable: PAD

Uji normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.45130241
Most Extreme Differences	Absolute	.173
	Positive	.173
	Negative	-.135
Kolmogorov-Smirnov Z		.548
Asymp. Sig. (2-tailed)		.924
a. Test distribution is Normal.		